

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 32

TAHUN 2006

## “Negara Mestinya Talangi Lapindo”

JAKARTA — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution meminta uang negara untuk perbaikan fasilitas publik di sekitar semburan lumpur PT Lapindo Brantas Inc. di Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai dana talangan. Artinya, perusahaan berikut pemilik unit usaha yang berafiliasi dengan Grup Bakrie itu tetap harus mengembalikan uang negara.

“Jelas itu (dana negara) dipakai sementara, tapi negara nanti menuntut kepada tauke (pengusaha)-nya tersebut supaya membayar,” kata Anwar di kantornya kemarin. Pemerintah pun harus tegas meminta Lapindo menjaminkan aset-asetnya. Toh, negara punya hak untuk itu dan mempunyai alat paksa. “Harus dipaksa supaya dia bayar. Kalau tak bayar, tangkap taukenya.”

Ia menanggapi rencana pemerintah menggunakan uang negara untuk proyek pelebaran jalur jalan arteri nasional Surabaya senilai Rp 168 miliar dan pemindahan rel di sekitar semburan lumpur senilai Rp 275 miliar. Rapat kerja Menteri Perhubungan Hatta Rajasa dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dengan Komisi Infrastruktur DPR dua hari lalu sepakat proyek-proyek itu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2007 dan APBN 2008. Akhir pekan lalu, Panitia Anggaran DPR juga menyetujui penggunaan dana bencana dalam APBN 2006 untuk membantu korban lumpur.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta kemarin mengatakan pemindahan rel bisa menggunakan APBN Perubahan 2007. “Tidak bisa menggunakan APBN 2006 dan 2007,” katanya ketika dihubungi *Tempo* di Jakarta. Menurut dia, alokasi dana akan masuk dana kontingensi dan harus disetujui oleh parlemen. Tapi ia mengaku belum menerima pengajuan anggaran dari Hatta. ● AGUS SUPRIYANTO | KURNIASIH BUDI

64

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 18

TAHUN 2006

### Dirjen IAEA akan kunjungi Indonesia

JAKARTA: Pemerintah memanfaatkan kunjungan Mohammed Elbaradei, Dirjen International Atomic Energy Agency (IAEA) ke Indonesia guna menghilangkan kecurigan negara luar tentang pengembangan energi nuklir di Tanah Air.

Selain itu, dalam kunjungan tersebut tidak ada agenda penandatanganan nota kesepahaman maupun permintaan penambahan bantuan atau dana.

Mohammed Elbaradei dijadwalkan berkunjung ke Indonesia selama tiga hari, mulai hari ini hingga 9 Desember.

Pada kesempatan tersebut, Elbaradei dijadwalkan bertemu dengan Presiden, Menteri Luar Negeri, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Komisi VII DPR.

Hudi Hastowo, Sekretaris Menristek, kemarin, mengatakan dengan kunjungan Elbaradei ke Indonesia diharapkan menjadi simbol menunjukkan tidak ada pemanfaatan energi nuklir di Indonesia untuk kepentingan politik, melainkan hanya untuk maksud damai. (Bisnis/09)

65

## MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 8

TAHUN 2006

# Gugatan Sapta atas Conoco tak diterima

Oleh TRI D. PAMENAN  
*Bisnis Indonesia*

JAKARTA: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya menyatakan tidak dapat menerima gugatan PT Saptasarana terhadap ConocoPhillips terkait sengketa pengadaan rig pengeboran minyak yang melibatkan kedua perusahaan itu.

Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang dipimpin hakim Lief Sofijullah, kemarin.

Menurut majelis hakim, penolakan atas gugatan PT Saptasarana diputuskan karena yang disampaikan penggugat dalam posita (gugatan) dianggap tidak jelas dan tidak sinkron dengan petitum (tuntutan).

Persidangan yang molor sekitar dua jam tersebut tidak dihadiri pihak penggugat. Meski begitu, majelis hakim menilai putusan tersebut tetap bersifat mengikat. Putusan sidang secara resmi akan disampaikan

Pengadilan Negeri Jakpus kepada pihak penggugat.

Majelis hakim memberi waktu seminggu kepada penggugat untuk mengajukan upaya hukum atas keputusan itu.

Kuasa Hukum PT ConocoPhillips Indonesia Todung Mulya Lubis tak dapat menyembunyikan kegembiraannya setelah mendengar putusan majelis hakim.

"Putusan pengadilan ini memberikan angin segar bagi iklim penegakan hukum di Indonesia," ujarnya.

Ketika dikonfirmasi *Bisnis*, kuasa hukum penggugat, Rico Pandeirot dari O.C. Kaligis & Associates mengaku belum menerima putusan sidang tersebut.

"Kami baru mendengar garis besarnya saja. Kami justru ingin mempertanyakan pada bagian mana yang dianggap tidak saling mendukung antara posita dan petitum," ujarnya.

Yang jelas, lanjut Rico, pi-

haknya akan menyiapkan dua alternatif langkah. *Pertama*, memperbaiki materi gugatan. *Kedua*, mengajukan tuntutan baru. Untuk menentukan langkah mana yang akan dipilih, pihaknya akan lebih dulu berkonsultasi dengan klien.

Putusan atas sidang gugatan PT Saptasarana Personaprima terhadap ConocoPhillips sedianya diagendakan pada 15 November lalu. Namun, saat itu sidang ditunda karena majelis hakim di PN Jakpus tidak siap.

Sapta dan Conoco bersengketa karena perusahaan yang ditunjuk Conoco untuk menyediakan rig pengeboran migas itu dianggap tidak dapat memenuhi kontrak.

Sapta diminta membayar penalti kepada Conoco Rp28 miliar. Namun Sapta, yang sudah dinyatakan pailit oleh PN Jakpus dan kemudian menunjuk Randy Rizaldi sebagai kurator, belakangan justru menggugat Conoco.

Isi di luar tanggung jawab percetakan PT Akura Grafika Pratama

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input checked="" type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV <b>DES</b> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 6		
TAHUN 2006		

# Masalah Lumpur Panas Sudah Selesai?

Oleh KWIK KIAN GIE

Media massa edisi 2 Desember 2006 memberitakan, tanggung jawab Lapindo Brantas atas malapetaka yang disebabkan di daerah Sidoarjo mendekati penyelesaian.

Seluruh proses diketahui dan di bawah pengawasan pemerintah dengan personifikasinya Wakil Presiden. Wapres mengatakan, agar Lapindo Brantas agak murah hati dan jangan menawar. Namun, untuk tanah, bangunan, dan sawah milik penduduk yang terendam lumpur, dibeli dengan harga melebihi permintaan mereka sekitar 20 persen, agar mereka dapat hidup nyaman.

Ternyata, permintaan penduduk dipenuhi. Untuk tanah di harga Rp 1 juta per meter persegi, bangunan Rp 1,5 juta per meter persegi, dan sawah Rp 120.000 per meter persegi. Penduduk pun gembira, bersorak sorai, *kaulan* mencukur gundul rambutnya dan bersembah sujud.

Bodohkah rakyat itu? Tidak! Rakyat mengetahui, kandungan gas, minyak, dan mineral lain di dalamnya, bukan milik mereka. Milik rakyat hanyalah permukaan

bumi yang dihuni dan dijadikan sawah. Kalau ini diganti di tempat lain yang mungkin lebih baru dan lebih modern, mereka jelas bergembira.

### Banyak pertanyaan

Yang menjadi pertanyaan, apakah dengan demikian Lapindo Brantas dianggap telah memenuhi semua kewajiban dan tanggung jawabnya, sehingga kepadanya beserta pemilik dan pengelolaanya dapat diberikan *release and discharge*, atau pembebasan dan pelunasan?

Jika seperti itu, apakah beberapa manajer yang sedang dalam penyidikan oleh polisi di Jawa Timur akan dibebaskan dan penyidikan dihentikan?

Dengan pembayaran itu, apakah berarti Lapindo Brantas menjadi pemilik mutlak tanah ratusan hektar yang tergenang lumpur, dan boleh berbuat apa saja dengan tanah itu?

Artinya, apakah Lapindo boleh membiarkan dan meninggalkan tanah dalam kondisi tergenang lumpur seperti itu? Apakah tanah seluas itu boleh dirusak oleh setiap orang, asal mampu membayar dengan harga yang dapat diterima pemiliknya?

Bagaimana dengan jalan raya bebas hambatan atau jalan tol

yang dibangun oleh pemerintah dan kini tidak dapat dipakai? Apakah untuk ini dan barang publik lain di sekitar daerah itu juga akan dijual kepada Lapindo Brantas? Berapa harganya?

Apakah penderitaan manusia dan kerusakan lingkungan hingga proporsi seperti itu dapat direduksi dengan cara menilai melalui angka-angka yang mencerminkan kewajaran harga tanah?

Apakah semua kekayaan alam dalam perut bumi, yang permukaan tanahnya dibeli Lapindo Brantas, begitu saja menjadi milik Lapindo Brantas?

Kini memang terlihat tanah mubazir tergenang lumpur. Tetapi bagaimana jika nanti diperoleh teknologi yang mampu mendapatkan minyak, gas alam, dan kekayaan mineral apa saja, meski tanah dan lingkungannya rusak berat, asal penduduknya dipindahkan ke tempat lain dengan imbalan memuaskan?

Siapa sebenarnya pemilik kekayaan mineral dalam perut bumi Indonesia? Apakah milik penduduk yang memiliki permukaan tanah yang dimilikinya?

Apakah pola penyelesaian kasus di Sidoarjo seperti itu akan dijadikan pola untuk kasus serupa di mana saja?

Apakah semua pulau dan ta-

nah dalam wilayah Republik Indonesia boleh dirusak, asal kepada penduduknya diberi imbalan memuaskan? Setelah itu semua kekayaan mineral yang ada dalam perut bumi menjadi milik pembelinya?

### Gamblang dan logis

Saya yakin, bagi semua manusia, semua itu belum selesai. Yang boleh dibeli oleh rakyat dengan hak milik sekalipun adalah permukaan bumi, bukan apa yang ada di dalam perut bumi.

Jadi, seandainya dalam perut bumi Pondok Indah atau Pantai Indah Kapuk yang sudah penuh rumah dan pertokoan mewah ada mineral berharga mahal, tentu tidak serta-merta akan merobohkan semua bangunan dan mengeksploitasi mineralnya. Lebih dari itu, jika dalam perut bumi tanah kosong yang dimiliki pengembang di Bumi Serpong Damai ada kandungan mineral, kandungan itu bukan milik keluarga Eka Tjipta Wdjaja.

Mengapa hal yang begitu gamblang dan logis saya kemukakan? Karena ada kesan kuat, para elite ikut-ikutan bergembira. Maka, sederet pertanyaan dalam tulisan ini semuanya amat penting.

KWIK KIAN GIE  
Econom Senior

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**  
1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 24

TAHUN 2006

# Target Penjualan Saham PGN Rp 1 Triliun

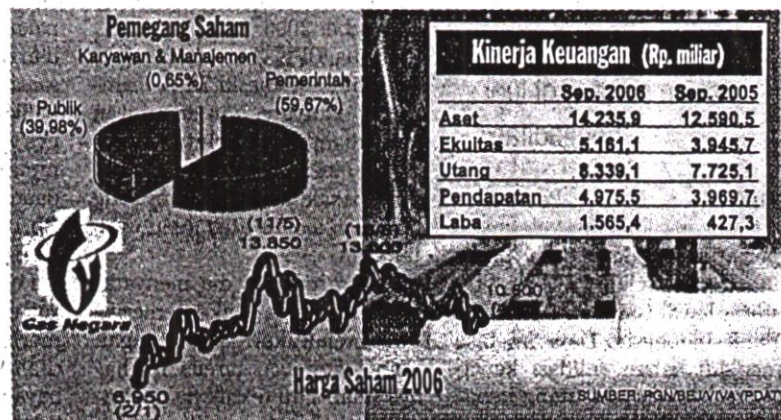
"Ada spekulasi pekan ini bakal dilepas ke pasar saham."

JAKARTA — Kementerian Badan Usaha Milik Negara tetap akan menjual 5,3 persen saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk. pada akhir tahun ini. Dana yang akan diraup minimal Rp 1 triliun. Sedangkan dalam perdagangan kemarin, harga saham PGN terus merangkak naik Rp 550, menjadi Rp 11.350 per lembar.

"Hasil privatisasi sekurang-kurangnya Rp 1 triliun. Jadi tak terlalu sulit," kata Menteri Negara BUMN Sugiharto di Jakarta kemarin. Tapi dia tidak bersedia menjelaskan secara detail waktu pelaksanaan aksi korporasi itu.

Analisis PT Valbury Sekuritas, Danny Eugene, mengatakan kabar santer yang berkembang di lantai bursa menyatakan saham PGN akan dilepas pekan ini. "Ada spekulasi pekan ini," katanya. Direktur Utama Bursa Efek Jakarta Erry Firmansyah mengatakan pemerintah harus berkoordinasi terlebih dulu sebelum menjual saham PGN. "Kalau perlu, nanti perdagangan saham PGN dihentikan dulu agar tidak dipermainkan spekulasi," katanya.

Penjualan saham PGN adalah bagian dari rencana pemerintah mendapatkan penerimaan negara Rp 3 trili-



un untuk menutup defisit anggaran tahun ini. Beberapa bulan terakhir ini, rencana tersebut tidak jelas realisasinya, padahal tahun buku 2006 hampir berakhir. Sugiharto menyatakan akan menjual PGN di atas harga pasar karena, mengacu pada penilaian analisis, harga premium saham PGN senilai Rp 16-18 ribu per lembar. Tapi harga tertinggi sahamnya di pasar Rp 14 ribu, bahkan belakangan terus merosot ke level Rp 11 ribu.

Seorang pejabat Kementerian BUMN menyatakan pemerintah tetap berupaya agar penjualan saham PGN memperoleh hasil optimum. "Hasilnya kami harapkan bisa memperoleh premium sekitar 15 persen (dari harga pasar)," katanya. Jadi total dana yang akan diraup Rp 2,5 triliun.

Sugiharto menyatakan dana hasil

penjualan saham PGN untuk menambal defisit anggaran dan penyer-taan modal negara di perusahaan BUMN. "Untuk menutup defisit Rp 1 triliun dan sisanya untuk penyer-taan modal negara," katanya. Perusahaan pelat merah yang akan disuntik adalah PT Garuda Indonesia sebesar Rp 500 miliar. Selain itu, Garuda masih punya utang sekitar US\$ 750 juta kepada Bank Mandiri, European Credit Agency, dan Bank BNI.

Di sisi lain, ada lima perusahaan penerbangan asing yang berminat menjalin aliansi strategis dengan Garuda. "Mereka mengajukan proposal dan menemui pemegang saham (pemerintah)," kata Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar kepada *Tempo*, Selasa malam lalu.

● YULIAWATI | BUDI RIZA

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**  
1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 14

## Pemerintah Tetap Privatisasi PGN Tahun ini

TAHUN 2006

JAKARTA – Pemerintah bersikukuh melepas sekitar 5,13% saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dalam beberapa minggu ini. Dana hasil privatisasi lanjutan BUMN itu bisa dimanfaatkan untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2006.

Menteri Negara BUMN Sugiharto menjelaskan, pemerintah juga mengharapkan hasil privatisasi PGN tersebut mampu menutup target privatisasi BUMN senilai Rp 3,1 triliun tahun 2006.

"*Insya Allah, kan masih ada waktu tiga minggu lagi untuk melepas saham PGN. Sekarang masih dalam proses. Menjual saham PGN kan gampang karena listed company,*" ujar dia pada *Good Corporate Governance as a Strategy to Facilitate Financing In Public Service* di Jakarta, Rabu (6/12).

Kementerian BUMN sebelumnya mengisyaratkan, divestasi 5,13% saham PGN di pasar telah disetujui DPR. Hasil penjualan saham itu diperkirakan mencapai Rp 2,5 triliun dan akan digunakan untuk menutupi setoran privatisasi BUMN pada APBN 2006 sebesar Rp 3,1 triliun.

Pemerintah selaku pemegang saham mayoritas PGN menguasai 59,37% saham. Meski pemerintah menjual 5,13% saham pada BUMN tersebut tidak akan mengubah posisi pemerintah selaku pemegang saham pengendali.

Sugiharto menjelaskan, dana hasil privatisasi sebesar Rp 2,19 triliun digunakan untuk penyertaan modal negara (PMN) dan sisanya untuk menutup defisit APBN. "PMN belum tentu bisa menyerap dana dari yang

ditargetkan," ujarnya.

Meneg BUMN belum bersedia menyebutkan *underwriter* divestasi itu. Namun, sejumlah pihak mengungkapkan, pemerintah telah menunjuk dua perusahaan sekuritas milik negara yakni PT Bahana Securities dan PT Danareksa Sekuritas sebagai penasehat keuangan divestasi tersebut.

Terkait rencana divestasi PGN, Dirut Bursa Efek Jakarta (BEJ) Erry Firmansyah mengemukakan, perseroan bisa meminta suspensi saham dalam rangka privatisasi tersebut. Pasalnya, pelepasan sekitar 5,13% saham bisa bersifat material sehingga mampu mempengaruhi harga saham.

"Kalau perseroan mau melepas sekitar 5%, mereka bisa minta suspensi sehingga harga sahamnya tidak naik-turun terus," ujarnya.

Pada perdagangan di BEJ kemarin, harga saham PGN menguat sebesar Rp 550 menjadi Rp 11.350 per saham. Jumlah saham berpindah tangan mencapai 41,69 juta lembar dengan nilai transaksi sebesar Rp 468,97 miliar.

Menyangkut penawaran umum perdana (IPO) saham BUMN dalam rangka privatisasi 2007, Sugiharto menjelaskan, pemerintah menargetkan bisa melepas sekitar 14 saham BUMN ke publik. Di antara perusahaan negara itu adalah PT Jasa Marga, PT Bank Tabungan Negara, PT Wijaya Karya. Namun, hingga kini rencana itu belum disetujui komite privatisasi dan DPR. Kementerian BMIN akan membawa rencana *go public* BUMN itu kepada komite privatisasi pekan depan. (hut)

MONITOR BERITA

<input checked="" type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31										
HALAMAN : 1											TAHUN 2006

## Energi diminta beberkan nilai ganti rugi Lapindo

Oleh ARIF GUNAWAN S.,  
RAHAYUNINGSIH & PUDJI LESTARI  
*Bisnis Indonesia*

JAKARTA: Otoritas pasar modal dan BEJ meminta PT Energi Mega Persada Tbk segera melaporkan nilai ganti rugi dan sumber pendanaan yang akan diberikan unit usahanya, Lapindo Brantas Inc, kepada masyarakat yang terkena musibah di Sidoarjo, Jatim.

"Karena mereka perusahaan publik maka mereka harus memenuhi persyaratan *disclosure* atau keterbukaan informasi tanpa harus diminta oleh otoritas pasar modal ataupun BEJ," ujarnya Kepala Biro Penilaian Keuangan Sektor Riil Bapepam-LK Nurhaida kepada *Bisnis*, kemarin.

Dia enggan berkomentar ketika ditanyakan apakah transaksi itu merupakan material atau tidak, karena pihaknya belum menerima laporan berapa nilai ganti rugi.

Pada awal pekan ini, manajemen Lapindo menyatakan kesediaan untuk memenuhi tuntutan warga dari empat desa di Sidoarjo dengan memberikan ganti rugi senilai Rp1,5 juta/m<sup>2</sup> untuk bangunan, Rp1 juta/m<sup>2</sup> untuk tanah pekarangan dan Rp120.000/m<sup>2</sup> untuk tanah sawah.

Direktur Utama BEJ Erry Firmansyah mengatakan pihaknya mendukung langkah pemberian ganti rugi anak perusahaan Energi Mega itu, namun sesuai ketentuan Energi Mega harus memberi informasi jika secara material memengaruhi kas perseroan.

"Jika dana ganti rugi itu dari

Energi Mega, kami akan meminta keterangan sesuai prinsip keterbukaan biasanya, yakni dalam waktu 2 x 24 jam."

Vice President of Capital Markets Energi Mega Herwin Hidayat mengatakan perseroan masih belum juga bisa mengungkapkan jumlah dana yang akan dibayar Lapindo.

"Sejak kemarin [Selasa] kami masih terus rapat dari pagi hingga malam untuk memformulasikan pernyataan kesanggupan manajemen Lapindo ke Timnas itu ke dalam pernyataan yang lebih konkret." (arif.gunawan@bisnis.co.id/rahayuningsih@bisnis.co.id/pudji.lestari@bisnis.co.id)

# MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

HALAMAN: 14

JAKARTA – Hasil riset Dana-reksa Sekuritas mengungkapkan, PT Medco Energi Internasional Tbk berpeluang melikuidasi anak usahanya, PT Medco E&P Brantas (MB). Sebab, estimasi penggantian kerugian luapan lumpur di Sumur Banjarpanji-1 Sidoarjo yang ditanggung perseroan bisa mencapai lebih besar dari nilai buku hingga US\$ 70 juta. Medco Energi memiliki 32% *working interest* pada Blok Brantas.

Analisis Danareksa Bonny Setiawan dalam kajiannya mengenai Medco menjelaskan, perusahaan akan mengeluarkan dana hingga US\$ 70 juta guna menanggung kerusakan akibat luapan lumpur. "Jumlah tersebut sama dengan nilai buku Medco Brantas. Oleh karena itu, MB kemungkinan bisa dilikuidasi, kecuali jika luapan lumpur segera bisa dihentikan," tulis dia.

Hingga akhir September 2006, MB membukukan akselerasi depresiasi sebesar US\$ 22,3 juta, sehingga menyebabkan rugi bersih US\$ 17 juta dan secara konsolidasi kerugian bisa mencapai US\$ 8 juta. Kejadian terburuk dapat terjadi bila berdasarkan estimasi PT Energi Mega Persada Tbk diperlukan dana sampai US\$ 180 juta untuk merehabilitasi area dan biaya lain.

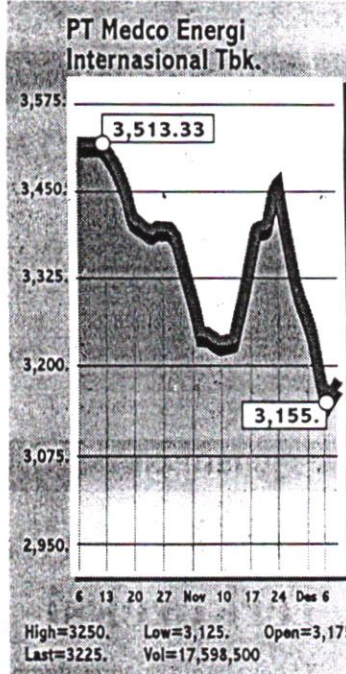
Menurut Bonny, Medco harus mengeluarkan dana cadangan (provisi) sekitar US\$ 58 juta atau lebih besar dari estimasi Danareksa sebelumnya US\$ 32 juta.

Di luar hasil gugatan arbitrase terhadap Energi, analisis tersebut mengasumsikan, pencadangan kerugian sekitar US\$ 32 juta. Dengan mengesampingkan dana provisi, laba bersih inti diperkirakan mencapai US\$ 89 juta.

"Bila MB dilikuidasi tahun depan, Medco membukukan kerugian lagi US\$ 40 juta dari kerusakan aset, sehingga memangkas proyeksi laba bersih 2007 sekitar 60% menjadi US\$ 43 juta," paparnya.

Menanggapi kajian Danareksa tersebut, baik *Corporate Secretary* Medco Andi Karamoy maupun Dirut Medco E&P Lukman Mahfudz tidak bersedia berkomentar.

Andi mengaku investor tetap menunggu kepastian langkah Medco. Oleh karena itu, perseroan kini menunggu laporan kuartal empat



DES

7 28 29 30 31

TAHUN 2006

## TARGET HARGA SAHAM TURUN Medco E&P Brantas Berpeluang Dilikuidasi

2006 untuk memastikan jumlah dana yang dikeluarkan. "Kami menunggu hasil perhitungan operator. Yang pasti, kami tidak lari dari tanggung jawab sesuai porsi kepemilikan saham 32%," jelas dia kepada *Investor Daily*.

### Cash Call

Per September lalu, Medco telah mengerluarkan provisi senilai US\$ 14 juta untuk penyelesaian kasus lumpur panas. Bertambah atau tidaknya biaya hingga akhir tahun 2006, lanjut Andi, masih menunggu hasil perhitungan pada kuartal keempat mendatang. Di luar dana bencana, lanjut dia, Medco tetap membayar biaya rutin (*cash call*) sekitar US\$ 3-4 juta.

Lukman menilai, estimasi Danareksa itu masih terlalu awal. Yang pasti, Medco terus mengupayakan yang terbaik untuk kepentingan rakyat. Namun demikian, perseroan juga memiliki kewajiban terbatas sesuai persentase kepemilikan saham.

Danareksa menurunkan target harga saham Medco untuk 12 bulan dari Rp 5.026 per lembar menjadi Rp 4.555. Target itu ditetapkan dengan asumsi Rp 10.121 per dolar AS. Harga tersebut setara dengan 15,3-14,2 kali *price-to-earning ratio* (PER) inti 2007-2008 dan 5,2-4,8 EV/EBITDA 2007-2008. (mdn)

71



MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input checked="" type="radio"/> SUARA KARYA		<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																												
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI		<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM																										
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN: 6											TAHUN 2006																			

# BPK Restui Dana APBN 2007 Untuk Korban Lapindo

*JAKARTA (Suara Karya): Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menganggap penggunaan dana APBN 2007 untuk memperbaiki prasarana umum korban lumpur panas Lapindo, sudah seharusnya dilaksanakan untuk menanggulangi kerugian yang ditimbulkan.*

"Jelas pakai dulu sementara anggaran negara, nanti dituntut ke tauke-nya supaya nanti dibayar," kata Ketua BPK Anwar Nasution usai pembukaan sosialisasi UU No.15/2006 tentang BPK di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum, Joko Kirmanto menyatakan, pemerintah dan Komisi V DPR sepakat untuk menggunakan dana APBN 2007 untuk menambah lajur di jalan arteri Porong yang selama ini menggantikan jalan tol Porong-Gempol yang tertutup lumpur panas.

DPU sendiri, katanya, telah menyiapkan dana sebesar Rp 168,65 miliar dari APBN 2007 dan 2008 untuk kepentingan tersebut. Sedangkan penambahan lajur dari dua menjadi empat lajur itu dilakukan pada jalan arteri sepanjang 78 kilometer.

Anwar kemudian menyatakan, seharusnya yang juga ditanggung oleh dana APBN prasarana umum yang lebih besar lagi seperti pipa gas yang kemarin meledak, jalan kereta api, instalasi listrik, dan lain sebagainya.

Sementara itu, keresahan warga

pemilik tanah dan bangunan korban lumpur yang tidak bersertifikat semakin tenang menyusul makin lencurnya persyaratan untuk mendapatkan ganti rugi. Sebelumnya, ribuan warga korban lumpur sempat resah karena mayoritas tidak memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan.

Menurut Jubir Timnas Penanggulangan Lumpur Rudi Novriyanto, warga bahkan berhak menerima ganti rugi sepanjang bisa menunjukkan surat pethok D. Bahkan untuk data yang sesuai dengan surat letter C juga diupayakan bisa menerima ganti rugi. "Dalam hal ini nantinya diperlukan surat keterangan dari kepala desa masing-masing untuk memperkuat kepemilikan lahan," ujarnya.

Saat ini, kata dia, Timnas dan ITS terus melakukan pendataan sekaligus verifikasi menyangkut kepemilikan, luas dan lokasi lahan. Diharapkan pendataan selesai April tahun depan yang diikuti pencairan ganti rugi.

Berdasarkan data yang ada, hak ganti rugi yang mencapai Rp 2,5 juta per meter persegi itu baru berlaku un-

tuk warga 4 desa seperti Kedungbendo, Siring, Jatirejo, dan Renokenongo. Di lokasi itu terdapat sekitar 15 ribu rumah dan 70 hektar lahan yang menjadi korban banjir lumpur.

Sementara, meski masih butuh waktu agak lama, rencana penerimaan uang ganti rugi direspon beragam oleh masyarakat. Informasi yang dihimpun *Suara Karya* di lapangan, meski banyak yang berencana menajdikan uang sisa pembelian rumahnya kelak untuk tabungan, tidak sedikit yang berencana menggunakan uang ganti rugi itu untuk berhaji.

Sejumlah tokoh masyarakat di sejumlah desa itu bahkan khawatir, uang ganti rugi itu justru akan memicu polemik diinternal keluarga masing-masing warga korban lumpur.

Salah seorang tokoh Desa Jatirejo, Sulaiman mengaku sudah melihat gejala tidak sehat bila uang sudah diterima penduduk. Dia mencontohkan tentang rencana warga yang awalnya hendak menghibahkan tanah untuk kepentingan sosial belakangan menarik kembali ucapannya. Ada juga warga yang sudah berulang kali dihubungi sanak kerabat dari luar kota, yang sebelumnya tak peduli nasib yang tengah menyimpannya di Porong.

Di lain pihak sebanyak 4-5 unit truk milik TNI dikerahkan untuk memudahkan transportasi belajar mengajar anak-anak korban lumpur yang tinggal di pengungsian. (Andira/Antara)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2006

## PGN Tutupi Target Divestasi 2006

Jakarta, *Bisnis Harian*

Kementerian BUMN berharap dapat melakukan divestasi saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) akhir tahun ini. Divestasi diharapkan dapat menutup defisit APBN 2006 dari sektor privatisasi sebesar Rp 1 triliun.

Demikian diungkapkan Meneg BUMN Sugiharto, di Jakarta, kemarin. "Masih ada waktu tiga minggu lagi. Untuk menjual PGN kan gampang karena listed company (perusahaan terbuka). Sekarang masih dalam proses," ujar Sugiharto, di Jakarta, kemarin.

Hasil divestasi saham PGN, lanjut dia, menjadi andalan menutup defisit APBN 2006 dari sektor privatisasi

yakni Rp 1 triliun. Pelepasan saham PGN sebesar 5,31% sebelumnya telah disetujui DPR. Tahun ini pemerintah menargetkan pendapatan privatisasi Rp 3 triliun. Namun hingga akhir November 2006 perolehan masih jauh dari target.

Isu divestasi saham PGN sudah sejak jauh-jauh hari didengar investor. Terlihat dari harga saham PGN yang mengalami peningkatan. Bahkan hingga penutupan perdagangan kemarin, saham PGN ditutup di level Rp 11.250 naik Rp 450 dibanding pembukaan. Pemerintah dikabarkan menunjuk PT Bahana Securities

dan PT Danareksa Sekuritas untuk menangani divestasi ini.

Dirut Bursa Efek Jakarta (BEJ)

Erry Firmansyah menambahkan, apabila nilai divestasinya besar maka BEJ perlu melakukan suspensi saham PGN. "Kalau nilainya 5% tentu saja besar. Kami belum tahu angka pastinya," katanya.

Namun begitu, menurut Erry, bila nilainya kecil atau hanya penem-

patan saham maka hal itu diserahkan kepada mekanisme emiten tersebut. "Suspensi dilakukan agar harga saham tidak dipermainkan pasar, biasanya hanya satu hari." ● 27C



Sugiharto

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA				<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input checked="" type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI		<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM																										
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 3											TAHUN 2006																			

## DPR Sorot Kinerja Timnas Lumpur Lapindo

[JAKARTA] Kalangan DPR, khususnya Komisi VIII yang membidangi pertambangan memuji keputusan PT Lapindo Brantas yang mau mengganti kerugian masyarakat akibat semburan lumpur perusahaan tambang itu, sesuai tuntutan warga di Porong, Sidoarjo. Namun, di sisi lain, DPR tetap menyorot kinerja tim nasional (Timnas) Penanggulangan Lumpur Lapindo yang dinilai lamban dan tidak bisa berbuat banyak.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Sutan Bhatogana di Jakarta, Selasa (5/12) menyatakan, apa yang dilakukan PT Lapindo dengan memenuhi tuntutan rakyat, sesuai dengan harapan DPR. "Sejak awal kita berjuang agar hak-hak rakyat jangan diabaikan, itu sudah bagus, karena rakyat sudah bisa keluar dari satu masalah, meskipun masalah lain akan tetap muncul," ujar Batoegana.

Wakil rakyat dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) itu lebih lanjut mengatakan, dengan disetujuinya harga tanah warga yang diluberi lumpur tersebut, sekarang tinggal pelaksanaannya. Soal Timnas Lumpur Lapindo, Sutan Bhatugana menegaskan, makin besarnya dampak kerugian yang ditimbulkan bencana tersebut, tidak terlepas dari kinerja Timnas. Dia juga menilai, Timnas selama ini hanya sibuk mengurus lumpur, sementara dampak sosial ekonomi dari luapan lumpur tidak ditangani oleh tim tersebut. [M-15]

75

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input checked="" type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV <b>DES</b> 1 2 3 4 5 6 <b>7</b> 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : {		TAHUN 2006

# Penanganan Lumpur Panas Terhenti

## 13 Juta Meter Kubik Lumpur Belum Dapat Dibuang

SIDOARJO, KOMPAS – Sejumlah langkah untuk menghentikan semburan lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terhenti. Padahal, volume semburan lumpur panas masih tetap tinggi. Selain itu, sekitar 13 juta meter kubik lumpur yang mengendap di kolam penampungan juga belum berhasil dibuang.

Banyaknya lumpur yang mengendap bisa menyebabkan tanggul penahan lumpur jebol karena terus mendapat tekanan dari semburan lumpur. Apalagi pada saat ini daerah di sekitar semburan lumpur sudah mulai turun hujan.

Berdasarkan pemantauan, Rabu (6/12), hampir semua langkah penanganan lumpur terhenti, mulai dari kegiatan di dua sumur penyumbat (*relief well*) di kanal pembuang sampai di pompa penyedot lumpur.

Di lokasi-lokasi tersebut, para petugas hanya sekadar menjaga, tetapi tidak mengoperasikan fasilitas pembuang lumpur tersebut.

Ketua Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, Basuki Hadimuljono mengatakan, peralatan pembuang lumpur tidak bisa beroperasi karena lumpur terlampau pekat, bahkan mengering.

"Kami sudah berupaya mengencerkan lumpur dengan menyemprotkan air dari Sungai Porong. Namun, debit air sungai tidak memadai," kata Basuki.

Lumpur yang terlampau pekat dan mengering menyebabkan upaya pembuangan lumpur melalui kanal pembuang ke Sungai Porong terhenti. Di kanal tersebut lumpur mengering dengan ketebalan sekitar 1-3 meter dan

panjang 150 meter. Upaya pembuangan lumpur dengan target 449.280 meter kubik per hari melalui metode ini pun gagal dilakukan.

Metode lain, yakni mengoperasikan dua unit pompa pembuang lumpur yang sudah disiapkan di Desa Besuki, kini pengoperasiannya pun terhenti karena lokasinya terendam lumpur. Kedua unit pompa ini dirancang membuang langsung lumpur dari kolam penampungan ke Sungai Porong melalui pipa sepanjang 1,5 kilometer.

Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa kedua metode tersebut baru berhasil membuang lumpur ke Sungai Porong sekitar 1,5 juta meter kubik. Padahal, volume lumpur di kolam penampungan sekitar 13 juta meter kubik.

Jika satu *dump truck* volumenya 10 meter kubik, jumlah lumpur yang mengendap ini setara dengan 130.000 *dump truck*. Jika masing-masing *dump truck* pan-

jangnya lima meter, maka panjang keseluruhannya mencapai sekitar 650.000 meter atau 650 kilometer.

### Sumur penyumbat berhenti

Berkaitan dengan upaya menghentikan semburan lumpur, selama ini dioperasikan dua sumur penyumbat, masing-masing berlokasi di Desa Jatirejo dan Benokenongo di Kecamatan Porong. Namun, sejak tanggal 22 November 2006, ketika lumpur meluber ke jalan tol yang disertai ledakan pipa gas Pertamina, pengoperasian sumur penyumbat tersebut diputuskan untuk dihentikan.

Ketua Tim Supervisi Penghentian Semburan Lumpur Rudi Rubiandini mengatakan, sumur penyumbat di Desa Jatirejo berhenti karena sedang dalam tahap penyemenan pipa selubung. Adapun sumur penyumbat lainnya, lokasinya masih terancam lumpur.

7C

"Di atas persoalan teknis, saya menangkap kesan tidak ada upaya serius menjalankan *relief well*," kata Rudi.

Sejumlah program penanggulangan bencana lumpur panas terhenti di tengah jalan. Ini terjadi, misalnya, pada penyemprotan cairan kimia TX-88 yang bertujuan menguatkan tanggul tanah penahan lumpur.

Berdasarkan pemantauan, ditemukan sejumlah tong plastik TX-88 masih utuh tergeletak di tanggul.

Begitu pun pemadatan tanggul dengan menggunakan *iron slack* atau kerak besi sekarang dihentikan karena tidak direkomendasikan Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Bahan ini dinilai termasuk bahan beracun dan berbahaya (B3). Hingga menjelang musim hujan, tidak ada upaya efektif untuk membuang lumpur yang tertampung di kolam-kolam penampungan.

Selain lumpur belum berhasil dibuang ke Sungai Porong, kini aliran lumpur panas berubah arah ke kawasan Perumahan

Tanggulangi Anggun Sejahtera (TAS) I. Perumahan yang terdiri atas 4.000 rumah tersebut kini sudah terendam lumpur panas setinggi satu sampai dua meter sehingga ditinggalkan sekitar 5.678 jiwa penghuninya yang kini mengungsi ke Pasar Baru Porong.

#### Potensi Jebol

Aliran lumpur deras ke perumahan ini terjadi karena jebol-an tanggul di sisi jalan tol belum dapat ditanggulangi akibat hebatnya luberan lumpur. Lalu, dengan terhentinya penanggulangan, maka beban tanggul akan semakin berat menahan. Ini pada akhirnya berpotensi jebol tak terkendali.

Berkaitan dengan ledakan pipa gas Pertamina di sekitar semburan lumpur panas, Kepolisian Daerah Jawa Timur menetapkan belum ditemukan tindak pidana dalam kasus tersebut.

Keputusan ini diambil setelah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), memvisum para korban ledakan, dan meminta keterangan dari para saksi ledakan. Sejauh ini sudah 21 orang yang diperiksa, yaitu warga

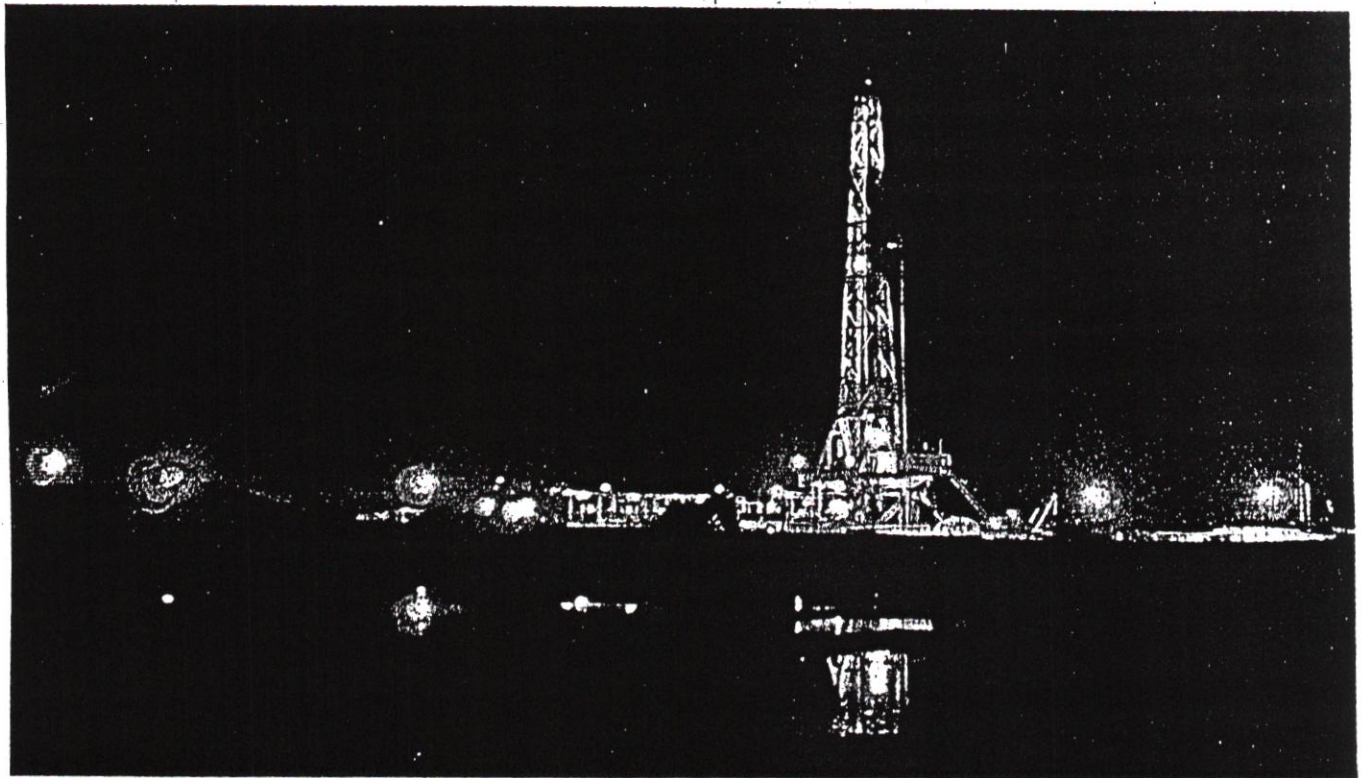
yang berada di sekitar lokasi ledakan, para pengawas pipa, polisi, korban, dan petugas dari Pertamina.

"Ini alamiah, tidak ada unsur pidana, jadi baik Lapindo maupun Pertamina tidak terkait dalam ledakan tersebut," ujar Komisaris Besar Widjaya Purbaya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Widjaya Purbaya menambahkan, kalau sebuah kasus dikatakan memiliki tindak pidana, maka harus ada tersangka. Adapun dalam kasus ledakan pipa gas ini tidak ada satu tersangka pun yang ditemukan oleh petugas kepolisian.

Setelah pipa gas Pertamina meledak 22 November lalu, Kepolisian Daerah Jawa Timur yang dibantu oleh jajaran kepolisian di Sidoarjo melakukan penyelidikan atas kasus tersebut.

Akibat meledaknya pipa itu, 13 orang meninggal dunia, dua orang masih hilang, dan 14 lainnya luka-luka. Ledakan ini juga menenggelamkan ruas tol Porong-Gempol di Kilometer 38 akibat tanggul penahan lumpur jebol. (LAS/AB8)



KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Relief Well I yang berada di sekitar pusat semburan lumpur sudah tidak berfungsi, Rabu (6/12) malam. Berdasarkan pemantauan, Rabu, hampir semua langkah penanganan lumpur terhenti, termasuk kegiatan di kanal pembuang dan di pompa penyedot lumpur.

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

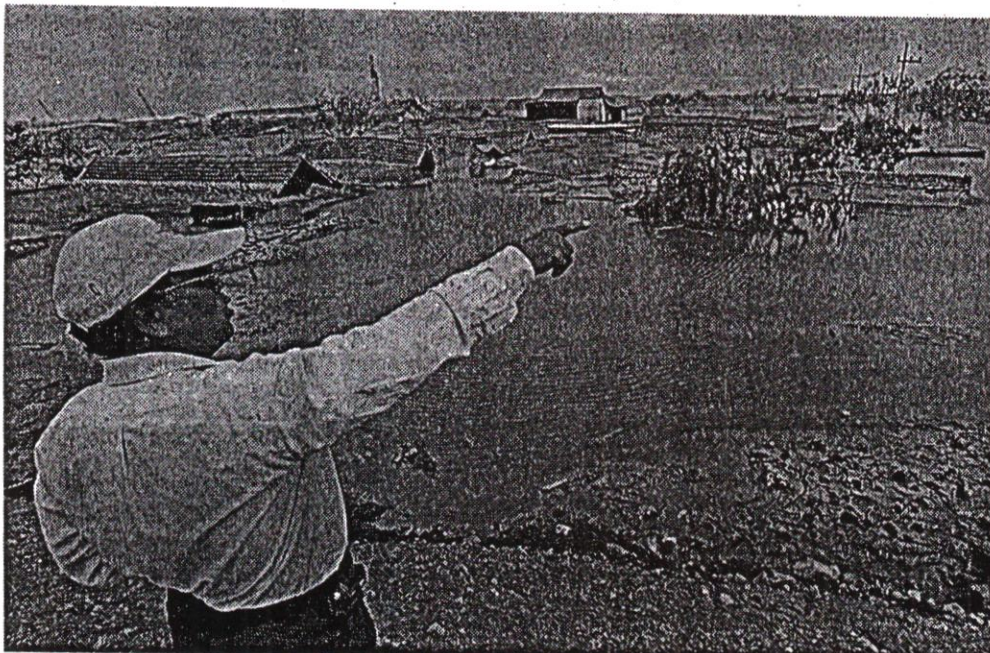
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2006

# Timnas Lapindo Sampaikan Klaim

*Sebanyak 20 Perusahaan Ajukan Penggantian Rp 332 Miliar*



M. GELORA SAPTA/PR

*SEORANG* warga menunjukkan wilayah desanya yang tenggelam akibat luapan lumpur Lapindo Brantas di Desa Jatirejo Porong Sidoarjo, Sabtu (2/12). Timnas Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo mulai mengerjakan pengajuan klaim ganti rugi terhadap 20 perusahaan korban luapan lumpur Lapindo senilai Rp 332 miliar.\*

## SIDOARJO, (PR).-

Pengajuan klaim ganti rugi terhadap 20 perusahaan korban luapan lumpur Lapindo senilai Rp 332, miliar mulai dikerjakan Timnas Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo (PSLS) dengan membuat surat pengajuan usulan klaim 20 perusahaan itu kepada Lapindo Brantas Inc. Pengajuan klaim ini diharapkan mendapatkan jawaban dari Lapindo maksimal dalam waktu satu bulan.

Demikian dikemukakan Unit Sosialisasi dan Kompensasi Bidang Penanganan Sosial Timnas PSLS, Vito Rudi Muntiawan, saat menerima perwakilan perusahaan yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Korban Luapan Lumpur (GPKLL) di Kantor Bappekab Sidoarjo, Rabu (6/12).

Sebelum mengajukan surat usulan, pihaknya akan melakukan klarifikasi proposal

pengajuan klaim dari GPKLL, kemudian akan dilanjutkan dengan membuat surat usulan dari Bupati Sidoarjo, selaku Koordinator Penanganan Bidang Sosial kepada pihak Lapindo melalui Timas PSLs.

"Surat usulan yang akan kami sampaikan ke Lapindo ini, minta petunjuk terlebih dahulu kepada Pak Bupati. Dalam surat usulan ini, jumlah klaim kami akan menyesuaikan dengan proposal yang diajukan oleh 20 perusahaan menjadi korban luapan lumpur," ungkap Vino.

Tentang ajuan klaim disetujui atau tidak, pihaknya mengaku hanya bisa mengusulkan saja dan menyerahkan seluruh kewenangan itu kepada pihak Lapindo. "Apakah nanti dipenuhi atau tidak, semua tergantung dari verifikasi yang dilakukan Lapindo terhadap masing-masing perusahaan," tuturnya.

Mengenai *deadline* (tenggat

waktu) pengajuan klaim 20 pengusaha, Vino berharap, agar dalam jangka satu bulan, klaim tersebut bisa segera mendapatkan jawaban dari Lapindo.

Ketua GPKLL, Joko Abandi Sapto menyatakan, dengan adanya *deadline* itu, pihaknya meminta agar Lapindo melalui Timnas PSLs bisa memberikan jawaban secepatnya, karena lewat ajuan itu bisa memberikan kepastian yang jelas terkait dengan kelangsungan operasional perusahaan. "Satu bulan itu adalah waktu yang masuk akal, karena kami memaklumi bukan urusan kami saja yang diurus, tapi juga ada urusan yang lain," tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Satlak Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satlak PBP) korban lumpur panas Lapindo Surya Nirwansyah nyaris tertipu oknum yang mengaku staf Mensos. (Ant)\*\*\*

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 31

TAHUN 2006

# Saham PGN dilego dua pekan lagi

Oleh RAHAYUNINGSIH & WISNU WIJAYA  
*Bisnis Indonesia*

JAKARTA: Meneg BUMN Sugiharto kemungkinan melego 5,31% atau 185,8 juta saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dalam satu hingga dua pekan ke depan setelah akhirnya berani memutuskan pengatur penjualan saham itu.

Satu eksekutif yang mengetahui transaksi itu mengatakan penjualan saham itu dilaksanakan menunggu harga PGN kembali naik setelah beberapa saat terkoreksi.

Kemarin, harga saham PGN ditutup melonjak Rp550 dari penutupan hari sebelumnya Rp10.800 per saham menjadi Rp11.350. Harga tertinggi saham PGN di level Rp13.600 pada penutupan 16 Agustus.

"Kemungkinan divestasi saham PGN dilakukan setelah harganya kembali naik. Mungkin dalam dua pekan ke depan," tuturnya.

Sugiharto dalam suratnya No. S-570/MBU/2006 tertanggal 30 November akhirnya berani mengambil keputusan dengan menunjuk PT Danareksa Sekuritas dan PT Bahana Securities sebagai penjamin emisi penjualan saham PGN.

Padahal, proses penetapan penjamin emisi divestasi PGN sudah diibandingkan sejak Oktober tahun lalu setelah Tim Seleksi Kantor Meneg BUMN waktu itu menetapkan Bahana Securities dan Danareksa Sekuritas masing-masing di urutan pertama dan kedua.

Ketika dikonfirmasi seputar pelaksanaan divestasi itu, Sugiharto tidak menjawab secara gamblang. Dia mengatakan privatisasi saham PGN tetap dilaksanakan tahun ini dan difokuskan minimal pada upaya pemenuhan defisit Rp1 triliun.

"Yang penting kan setorannya Rp1 triliun untuk menutup defisit artinya hasil kotor dikurangi penyertaan modal negara sekurang-kurangnya Rp1 triliun. Jadi, tidak terlalu sulitkan."

Dia menjelaskan meskipun harga saham PGN saat ini tidak setinggi beberapa waktu lalu, namun penjualan saham itu diyakini mampu menutupi kekurangan anggaran negara.

Satu manajer investasi dari sekuritas lokal mengatakan pemerintah telah kehilangan momentum kalau melego PGN saat ini. Pasalnya, harga saham PGN telah terkoreksi dalam dan belum kembali ke posisi tertinggi.

"Jika bisa mendapatkan hasil maksimum saat Rp13.600, kenapa pemerintah hanya ingin mendapatkan Rp1 triliun. Padahal, jika dijual pada Rp13.600

Kinerja PGN per September (Rp millar)

Keterangan	2006	2005
Pendapatan	4.975,47	3.969,73
Labanya	2.064,32	1.116,2
Laba bersih	1.565,36	427,32

Sumber: PGN

per saham, pemerintah dapat memperoleh uang segar Rp2,53 triliun," katanya.

### **Indikasi penjualan**

Namun, tuturnya, indikasi penjualan saham PGN dalam waktu dekat sudah terlihat dari lonjakan harga kemarin. "Sepertinya ada upaya menarik harga saham PGN mendekati level tertingginya."

Sugiharto menambahkan penyertaan modal negara (PMN) yang ditetapkan mencapai Rp2,19 triliun bakal tidak terserap semua dalam tahun ini sehingga privatisasi PGN akan lebih difokuskan pada upaya penutupan defisit anggaran.

Dirut PT Bursa Efek Jakarta Erry Firmansyah mengatakan sampai saat ini belum mendapatkan informasi tentang waktu privatisasi PGN.

"Jika memang dalam pelaksanaan privatisasi itu terjadi transaksi material dalam artian dapat memengaruhi harga, maka PGN dapat meminta kepada BEJ agar melakukan suspensi dan informasi itu dapat dimintakan sehari sebelumnya," tuturnya.

Suspensi saham, lanjut dia, bertujuan agar mencegah terjadinya spekulasi harga di pasar, permintaan itu sepenuhnya merupakan kewenangan dari PGN.

Sugiharto mengatakan pada tahun depan telah mengajukan 14 BUMN yang akan diprivatisasi dan usulan tersebut akan dibahas dalam Komite Privatisasi. ([rahayuningsih@bisnis.co.id](mailto:rahayuningsih@bisnis.co.id)/[wisnu.wijaya@bisnis.co.id](mailto:wisnu.wijaya@bisnis.co.id))

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM
JAN    FEB    MAR    APR    MEI    JUN    JUL    AGST    SEPT    OKT    NOV <b>DES</b> 1 2 3 4 5 6 <b>7</b> 8 9 10 11 12 13 14 15    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : 1		TAHUN 2006

**PENGANTAR:**

HAMPIR lewat enam bulan, semburan Lumpur Lapindo tak jua berhenti. Dampak yang ditimbulkan dari semburan lumpur panas yang lubernya mencapai 400 ha itu sangat dahsyat. Puluhan ribu warga di enam desa di Porong, Sidoarjo, terpaksa mengungsi karena kehilangan tempat tinggal. ekonomi Jawa Timur pun terganggu. Sementara itu, Lapindo Brantas yang bertanggung jawab atas kegiatan eksplorasi tersebut telah mengeluarkan dana cukup besar sekitar US\$ 77 juta.

Guna memberi gambaran komprehensif tentang kasus Lapindo hingga jurus-jurus yang dipakai pemilik untuk mengurangi beban kerugian pemegang saham publik, *Investor Daily* akan menurunkan delapan seri tulisan tentang Lapindo.

**LUMPUR LAPINDO (8-HABIS)**

*'Jangan Biarkan Rakyat Berjuang Sendirian'*

PT Lapindo Brantas Inc telah berkomitmen memenuhi tuntutan ganti rugi bagi warga korban semburan lumpur di Sidoarjo. Warga pun bersujud syukur. Selesaikah masalahnya? Jawabnya, belum. Kasus semburan lumpur itu masih menyimpan masalah yang kompleks.

Kasus semburan lumpur itu masih menyisakan dampak sosial, ekonomi, hukum, dan pranata kemasyarakatan. Berlanjutnya penyelesaian semburan lumpur telah

memperluas dampak sosial dan ekonomi. "Lapindo dan Tim Nasional (Timnas) penanggulangan lumpur tidak akan mampu mengatasinya," ujar Ali Subhan, pengamat sosial dari Universitas Sidoarjo.

Benarkah PT Lapindo Brantas Inc harus menanggung beban sendirian dalam musibah di sumur Banjarpanji-1, Porong, Sidoarjo? Bukankah MedcoEnergi dan Santos juga ikut berpartisipasi dalam Blok Brantas tersebut. Di Blok

Brantas, Lapindo memiliki 50% saham, MedcoEnergi 32%, dan Santos 18%. Bagaimana tanggung jawab pemerintah? Hingga kini, masalah itu masih menjadi perdebatan.

Sebagai induk perusahaan Lapindo Brantas, PT Energi Mega Persada Tbk (EMP) telah menyatakan, Lapindo akan menjadi penanggung jawab utama. Tanggung jawab itu baik terkait partisipasi sahamnya (*participating interest/PI*) yang mencapai 50% atau ka-

rena kelalaian dalam pengeboran. Di Blok Brantas, Lapindo memiliki 50% saham, MedcoEnergi 32%, dan Santos 18%.

"Berdasarkan perjanjian kerja sama operasi (JOA,) Exhibit A Artikel 2 paragraf 8, seluruh biaya yang terjadi akan ditanggung oleh seluruh partisipan, kecuali jika Lapindo melakukan kelalaian," tulis EMP dalam laporan keuangan perseroan per Juni 2006.

Dirut MedcoEnergi Hilmi Panigoro dan *Government & PR Manager Santos Indonesia* Drajat Panjawi telah menyatakan, Medco dan Santos akan ikut bertanggung jawab, tapi hanya sebatas partisipasi sahamnya. "Itu sesuai JOA dan Undang-Undang Perseroan Terbatas," jelas Hilmi.

Idealnya, menurut Hilmi, Lapindo menanggung beban lebih besar karena sebagai operator dan punya hak yang lebih dari pemegang saham lainnya. Lapindo sebenarnya telah mengasuransikan risiko pengeboran Banjarpanji-1 kepada asuransi Tugu Pratama dengan nilai pertanggungan maksimum US\$ 27,5 juta.

Medco memastikan tidak akan lari dari tanggung jawab sesuai porsi kepemilikan 32% Blok Brantas. "Kami akan tunggu hasil hitungan dari operator," jelas Andi Karamoy, sekretaris perusahaan PT Medco Energi Tbk.

Per September, Medco telah menyiapkan dana provisi sebesar US\$ 14 juta untuk kasus lumpur panas di Banjarpanji. Di luar dana insiden itu, Medco tetap membayarkan biaya rutin (*cash call*) sekitar US\$ 3-4 juta.

Sebagai pemilik terbesar saham di Lapindo, Keluarga Bakrie menyatakan siap membayar berapa pun kerugian yang muncul akibat banjir lumpur panas. "Kami akan merealisasikan semua keluhan-keluhan pengungsi," janji Nirwan Bakrie.

### Beban Lapindo

Berdasarkan perjanjian JOA, Lapindo kemungkinan menanggung seluruh biaya ganti rugi kepada warga, relokasi infrastruktur jalan tol, jalan kereta api, transmisi, gardu listrik, dan pipa gas Pertamina. Nilainya mencapai triliunan rupiah. Hingga akhir 2006, Lapindo diperkirakan mengeluarkan dana US\$ 70 juta, belum termasuk ganti rugi tanah, bangunan warga, dan relokasi infrastruktur. "Kejadian semburan lumpur di Porong adalah risiko bisnis yang harus dibayar. Apakah Lapindo melakukan kelalaian, hal itu yang harus diteliti," jelas Kurtubi, pengamat migas.

Pemerintah seharusnya juga bertanggung jawab. Dirjen Migas dan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) bertugas mengawasi dan mengontrol operasi Blok Brantas. Sesuai UU Migas No 21 Tahun 2002,

Dirjen Migas dan BP Migas seharusnya melarang kegiatan Lapindo karena sangat dekat dengan lokasi permukiman penduduk, makam, dan jalan tol. "Karena itu, mulai pimpinan hingga kepala divisi yang bertanggung jawab harus diberikan sanksi. Mengenai ganti rugi tetap tanggung jawab pemilik saham Blok Brantas atau Lapindo," kata Kurtubi.

Kepala BP Migas Kardaya Warnika menyatakan, berdasarkan kontrak Brantas PSC dengan pemerintah, Lapindo harus menanggung sendiri seluruh ganti rugi kepada masyarakat akibat luapan lumpur panas. Pada pasal 5 ayat 4 poin 2 disebutkan, kerugian selama sumur belum berproduksi ditanggung sepenuhnya oleh kontraktor, yakni Lapindo.

Pemerintah menolak dituding tidak bertanggung jawab. Pemerintah pusat sudah berusaha mengatasi dan mengendalikan dampak luapan lumpur. "Pemerintah pusat dari awal langsung membentuk tiga tim penanganan lumpur dan berpartisipasi," jelas Luluk Sumiarso, dirjen migas DESDM.

Berbagai kalangan menilai, pemerintah dan operator pertambangan sama-sama bertanggung jawab. Kedua pihak wajib menelaah berbagai aspek sebelum memutuskan penambangan di dekat rumah penduduk dan persawahan. "Lapindo sudah sepatutnya menanggung ganti rugi. Namun, pemerintah juga ikut bertanggung jawab karena mengeluarkan izin," jelas Frans Hendra Winata, praktisi hukum.

Menurut Frans, setiap perusahaan pertambangan wajib menyejahterakan masyarakat sekitar. "Perusahaan tidak boleh hanya berpikir untung. Mereka harus memikirkan tenaga kerja, keselamatan, keamanan, dan mata pencarian penduduk setempat," jelas Frans.

Merujuk UU PT, penanggung jawab kasus itu adalah Lapindo. Oleh karena itu, pihak kepolisian menyidik direksi Lapindo. Sesuai UU PT, direksi yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan, ujar Djoni Z Ishak, pengacara dari kantor Maqdir, Pieter & Ishak Law Firm.

Dalam kasus operasional, menurut Djoni, pemegang saham tidak bertanggung jawab. Sebab, mereka tidak melakukan kegiatan secara operasional. Namun, kasus ini tidak bisa hanya mengacu UU PT. "Masih banyak perundang-undangan yang harus ditaati," jelas dia.

Sebagai pemegang saham, mereka bisa saja mengambil tindakan likuidasi bila perusahaan itu tidak layak lagi bisa dipertahankan.

### Jalan Buntu

Setelah berkomitmen untuk memenuhi tuntutan warga, giliran 20 pengusaha yang menuntut pertanggungjawaban Lapindo. Para pengusaha korban lumpur itu mendesak Lapindo membayarkan ganti rugi dalam sebulan ke depan. Sebab, mereka harus menyelamatkan hidup para buruh yang tak bisa bekerja lagi.

Dalam pertemuan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab) Sidoarjo, Rabu (6/12), kedua pihak tidak menemukan kesepakatan (*deadlock*). Lapindo dan pengusaha belum bisa memastikan nilai ganti rugi, baik nilai tanah, bangunan, dan kerugian lainnya.

Penanganan ganti rugi untuk pengusaha berbeda dengan warga. "Lapindo sudah menurunkan tim khusus untuk menghitung kerugian masing-masing pengusaha," jelas Yuniwati Teriyana, *external relations* Lapindo Brantas Inc.

Yang pasti, berlarut-larutnya penyelesaian penyumbatan semburan lumpur Lapindo akan memperluas dampak sosial dan ekonomi. Tugas Timnas pun kian berat. Mereka harus bekerja ekstra untuk meminimalkan beban sosial dan ekonomi.

"Kondisi ini tidak bisa diselesaikan secara sektoral tapi harus melibatkan semua pihak," kata Ali Subhan.

Ali mengingatkan, masyarakat saat ini sudah jenuh dengan polemik mengenai siapa yang harus mendanai kerusakan infrastruktur. "Apa susahny pemerintah

dan Lapindo membuat komitmen itu. Pemerintah harus bertindak cepat. Kalau tidak, masyarakat akan menanggung beban sosial yang semakin berat," jelas dia.

Ali mengingatkan pemerintah agar benar-benar memikirkan beban sosial yang sudah dan mungkin terjadi. Pemerintah tidak seharusnya menyuruh warga menuntut kepada Lapindo. "Pemerintah pusat mestinya yang menuntut. Ini kan seperti warga suruh ngurus dirinya sendiri," tegas dia.

Kini, para pengusaha juga mulai mengeluhkan sulitnya mencari kredit. Sebab, perbankan tidak percaya lagi dengan agunan mereka. "Kalau semuanya diserahkan ke pemerintah Sidoarjo dan timnas jelas tidak akan mampu, karena dampaknya sudah luas," kata Syaiful, seorang pengusaha di Tanggulangin.

Yang pasti, musibah semburan lumpur telah mengubah pranata sosial masyarakat setempat. "Meski mereka telah menerima ganti rugi yang sesuai, relokasi terpadu satu desa (bedol desa) merupakan satu di antara kebijakan yang tepat," ujar Mustain, pengamat sosial dari Universitas Airlangga.

Pemerintah dan DPR telah memastikan tidak akan menganggarkan dana APBN untuk menangani kasus semburan lumpur Lapindo. Untuk alokasi dana talangan, pemerintah daerah harus mengajukan dana bencana kepada pemerintah pusat. Kemudian Badan Koordinasi Nasional dan menko kesra mengajukan kepada menkeu. "Setelah itu baru menkeu mengajukan kepada Panitia Anggaran DPR," ujar Menkeu Sri Muliyani. (*ros/lim/ari/mdn/hut/rad/ep*)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2006

## Pertemuan Pengusaha- Lapindo *Deadlock*

**SURABAYA**— Pertemuan antara pengusaha korban lumpur dan Lapindo soal ganti rugi di kantor Bappekab Sidoarjo Rabu (6/12) tidak menemukan kesepakatan (*deadlock*).

Finorudin Muntiawan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab) Sidoarjo usai pertemuan mengatakan desakan membayar ganti rugi pada para pengusaha itu karena pengusaha perlu menyelamatkan nasib buruh yang tidak bekerja akibat tempat kerjanya tenggelam lumpur.

"Dalam waktu satu bulan ini, minggu pertama digunakan untuk verifikasi data yang diajukan pengusaha untuk diganti rugi, dan tiga minggu berikutnya waktu verifikasi yang dibutuhkan Lapindo," katanya.

Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Joko Abandi Sapto mengatakan, waktu satu bulan yang diberikan pada Lapindo dinilai sangat rasional.

"Karena sampai sekarang belum ada angka pasti tentang besaran ganti rugi yang diajukan pengusaha, maka diharapkan pengusaha menilai dengan harga yang wajar. Harga wajar itu bisa disesuaikan Nilai Jual Obyek Pajak dari masing-masing perusahaan yang terendam lumpur bukan berdasarkan harga pasar," katanya.

Dia mengatakan, dalam pertemuan itu pengusaha menawarkan dua opsi harga ganti rugi aset mereka yakni harga aset disesuaikan dengan harga aset warga atau disesuaikan proposal yang diajukan masing-masing pengusaha.

Menanggapi hal itu, pihak Lapindo meminta waktu dua minggu untuk menentukan opsi apa yang akan dipilih atau ada kemungkinan opsi baru akan disampaikan

pada para pengusaha.

*External Relations* Lapindo Brantas Inc Yuniwati Teriyana mengatakan, penanganan ganti rugi untuk pengusaha berbeda dengan warga.

Dari 20 perusahaan di Porong yang kena dampak luberan lumpur panas total ganti rugi yang diajukan sesuai proposal para pengusaha sekitar Rp 332 miliar. Jumlah ini masih diluar uang untuk gaji para karyawan atau buruh dari masing-masing perusahaan.

### Kajian Teknis

Terkait kasus lumpur Lapindo, Ketua Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermingas) Effendi Siradjudin menilai upaya penanggulangan yang dilakukan selama ini terkesan lambat. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena para ahli sendiri masih berbeda pandangan terutama dalam memahami penyebab semburan lumpur panas tersebut.

"Kalau ahlinya saja belum satu pandangan, patut dipertanyakan apakah upaya penanggulangan yang selama ini dilakukan sudah sesuai dengan kondisi faktual," kata dia.

Saat ini, ada tiga hipotesis yang berkembang mengenai penyebab terjadinya luapan lumpur tersebut. Pertama, akibat kesalahan dalam proses pemboran (*drilling error*).

Kedua, gempa di perut bumi yang memicu pembentukan rekahan baru, sehingga rekahan yang sebelumnya kedap (*impermeable*) menjadi terbuka, dan menjadi tempat keluarnya lumpur. Ketiga, terkait dengan keberadaan gunung lumpur (*mud volcano*) berusia ribuan tahun di bawah lokasi pemboran. (ros/es)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM																												
JAN    FEB    MAR    APR    MEI    JUN    JUL    AGST    SEPT    OKT    NOV <u>DES</u>																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 7											TAHUN 2006																			

**Medco Group Bantu Pembangunan Sekolah**

BANTUL – Medco Group menyelesaikan pembangunan kembali Sekolah Dasar Negeri (SDN) Gondosuli, yang sebelumnya rusak akibat musibah gempa di Jogja pada 27 Mei 2006 lalu. Biaya yang dikeluarkan mencapai sekitar Rp 200 juta.

"Penyerahan fasilitas pendidikan ini kepada masyarakat adalah wujud komitmen kami dalam mendukung penyediaan pendidikan setelah bencana gempa yang melanda kawasan ini Mei silam," kata Arifin Panigoro, pendiri kelompok usaha Medco Group dalam siaran pers yang diterima *Investor Daily*, Rabu (6/12).

Penyerahan gedung sekolah tersebut dihadiri oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Bupati Bantul H. M. Idham Samawi. Arifin yang menjadi penasihat Tim Medco Peduli Yogya menjelaskan pembangunan kembali sekolah ini dapat diselesaikan oleh kontraktor lokal dalam waktu 3,5 bulan, lebih cepat dari target penyelesaian selama empat bulan.

Partisipasi yang dilakukan di Jawa Tengah ini melibatkan PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi), dan anak perusahaan yaitu PT Medco Power Indonesia (MPI), PT Medco Methanol Banyu (MMB) dan Yayasan Pendidikan Medco serta dibantu oleh donasi pribadi dari salah satu komisaris MedcoEnergi Gusti Aman Deru. (es)

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 15

TAHUN 2006

# Freeport Didesak tidak Abaikan Lingkungan

**Desakan itu merupakan respons pemegang saham atas kritik berbagai pihak terhadap Freeport.**

WASHINGTON — Sebuah lembaga pengelola pensiun yang memiliki saham cukup besar di Freeport-McMoRan Copper and Gold Inc, mendesak perusahaan tambang itu tidak mengabaikan lingkungan hidup di Papua. Lembaga itu mengancam untuk mempengaruhi pemegang saham lain di perusahaan tersebut, bila Freeport tetap abai dengan persoalan lingkungan hidup.

Perusahaan pengelola dana pensiun pekerja, guru serta polisi di negeri Abang Sam itu tercatat sebagai salah satu pemegang saham di Freeport-McMoRan. Saat ini, perusahaan dana pensiun tersebut menguasai sebanyak 544.458 lembar saham, senilai 29 juta dolar AS.

Langkah lembaga tersebut mengajak pemilik saham lain di Freeport-McMoRan untuk menjaga kelestarian alam di Papua diungkapkan, seorang pengawas keuangan untuk wilayah New York, William Thompson. Thompson mengungkapkan, desakan itu dilakukan pihaknya untuk menanggapi banyaknya kritik dan keluhan dari pemerintah Indonesia dan kelompok aktivis lingkungan hidup. Umumnya keluhan tersebut

adalah bahwa Freeport-McMoRan telah mencemari lingkungan hidup di Papua.

"Dokumen lingkungan hidup Freeport-McMoRan sangat kurang, sehingga perlu diuji," ujar Thompson dalam pernyataan resmi yang disirkan kemarin (6/12). Thompson mengatakan, sejak Freeport-McMoRan mengeruk keuntungan dari hasil eksplorasinya di Indonesia, paling tidak perusahaan itu harus menjamin tambang tembaga dan emas itu tidak merusak lingkungan hidup.

Pihaknya juga menandakan, Freeport-McMoRan juga harus menjamin operasi penambangan yang dilakukannya tak boleh mencemari sungai yang merusak kesehatan masyarakat di Tanah Papua. Thompson, yang mengatur dana pensiun di New York City itu, mengajak para pemegang saham untuk membawa masalah itu dalam pertemuan tahunan yang akan digelar 2007 mendatang.

Dengan begitu, pihaknya berharap Freeport-McMoRan bisa meninjau ulang kebijakannya dalam pelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Salah satu pemilik saham itu meminta perusahaan tambang raksasa itu dapat memberi laporan kepada seluruh pemegang saham terkait kebijakannya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup yang telah dilakukan di Papua dalam rapat umum pemegang saham September 2007.

Kalangan aktivis lingkungan hidup menuduh pihak

Freeport-McMoRan telah mencemari Taman Nasional Lorenz. Tak hanya itu, para pecinta lingkungan juga menyatakan perusahaan tambang itu telah mencemari daerah di sekitar tambang tembaga dalam operasinya di Papua.

Juru Bicara Freeport-McMoRan, Bill Collier, langsung membantah tuduhan yang dilontarkan kalangan pecinta lingkungan hidup itu. "Tuduhan itu tak benar sama sekali," ujar Collier. Pihaknya menegaskan, secara reguler, komisi audit eksternal dan internal telah memeriksa upaya yang telah dilakukan Freeport-McMoRan dalam menjaga kelestarian alam.

Tak hanya itu, Collier juga menegaskan hasil audit tersebut juga selalu dipublikasikan. Collier mengatakan, pihaknya akan merespons usulan yang diajukan salah satu pemegang sahamnya terkait kebijakan pelestarian alam dan lingkungan hidup di pertambangan Papua.

"Kami memiliki kebijakan dan program manajemen soal lingkungan hidup yang proaktif dan kuat," kilahnya. Pihaknya juga menyatakan telah melakukan penelitian yang cermat terkait masalah kelestarian lingkungan hidup di Papua.

Namun, Thompson tak menutupi kemungkinan bahwa Freeport telah mencemari lingkungan hidup di Papua. Ia berharap agar masalah pelestarian lingkungan hidup menjadi perhatian perusahaan tambang raksasa itu. ■ atp/hri

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31										
HALAMAN : 14											TAHUN 2006

**ANTARA** sedih dan senang, itulah ungkapan yang pas bagi sebagian warga korban lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim). Sedih, karena terpaksa berpisah dengan kerabat serta meninggalkan kampung halaman yang tenggelam diterjang banjir lumpur sejak enam bulan lalu. Senang, sebab PT Lapindo Brantas Inc akhirnya mengabulkan seluruh tuntutan ganti rugi yang diajukan 2.847 keluarga, Serin (4/12).

Ganti rugi itu yakni, Lapindo akan membayar tanah pekarangan kepada warga sebesar Rp1 juta per meter persegi dan bangunan rumah sebesar Rp1,5 juta meter persegi, semua akan dibayarkan paling lambat September tahun depan.

Imam Syafii, 35, warga RT 06 RW 03 Kelurahan Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo, mengaku sangat berat meninggalkan kampung

halaman yang sudah puluhan tahun didiaminya. Namun semua itu dapat terobati, sebab bapak satu anak itu bakal mengantongi uang sebesar Rp462,5 juta sebagai dana kompensasi rumah serta tanahnya seluas 185 meter persegi yang diterjang banjir lumpur.

"Belum ada rencana dengan uang itu. Semuanya harus dibagi dengan tiga adik saya karena rumah dan tanah tersebut warisan orang tua," kata Safii.

Tetapi yang jelas, mantan pekerja perusahaan kontraktor itu mengaku sudah tidak nyaman tinggal di rumah kontrakan di Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera II Blok R8 No 15, Tanggulangin, Sidoarjo. Apalagi setiap hari dia harus mengantar-jemput anaknya yang sekolah jauh dari kontrakan.

Memang, bagi sebagian korban

lumpur, hidup di kontrakan seakan memutus hubungan kedekatan dengan warga lain yang dulu hidup bertetangga. Setelah keluar dari pengungsian di Pasar Baru Porong, para warga ini akhirnya hidup berpencar mencari kontrakan rumah sendiri yang dibiayai Lapindo.

Di rumah kontrakannya Safii hanya mengandalkan uang bantuan yang diberikan Lapindo. Sejak tiga bulan lalu Safii sudah tidak lagi bekerja, begitu pula istrinya yang sudah tidak lagi bertugas sebagai anggota satuan pengamanan (satpam) di sebuah rumah makan di Kota Sidoarjo karena mengurus keluarga yang harus mengungsi. "Dulu waktu saya bekerja, penghasilan saya sekitar Rp1,5 juta per bulan ditambah gaji istri saya Rp700 ribu," paparnya.

Safii berharap uang dari Lapindo segera direalisasikan. Selain untuk biaya pindah dari rumah kontrakan, uang tersebut akan dipergunakan untuk menutupi biaya hidup sehari-hari.

Bukan cuma Safii, Khozin, 50, warga RT 5 RW 2 Desa Jatirejo, Kecamatan Porong, mengaku senang bercampur sedih setelah Lapindo mengabulkan permintaan warga.

Khozin, buruh tani, belum tahu apa yang harus dilakukannya. Pekerjaannya sebagai penggarap sawah warga sudah tidak bisa dilakukannya lagi, sebab lahan persawahannya di daerahnya rata dengan genangan lumpur.

Sekarang Khozin yang tinggal di rumah mertuanya di atas tanah seluas 125 meter persegi bakal mengantongi uang Rp297,5 juta. "Tetapi itu semua milik mertua saya. Saya sendiri cuma ikut senang kalau itu nanti benar-benar dibayar Lapindo," kata Khozin.

Safii, Khozin, serta warga lainnya, ternyata masih larut dengan dua perasaan senang dan sedih. Namun persoalannya, sebagian mereka masih ragu apakah dana kompensasi yang dijanjikan PT Lapindo Brantas Inc sebesar Rp1,75 triliun betul-betul terealisasi.

Saat ini ada sekitar 204 unit rumah dan tanah warga Kelurahan Siring, Porong, yang harus diganti. Termasuk 488 unit di Desa Renokenongo, Porong, Kelurahan Jatirejo, Porong, 825 unit, dan Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin, 597 unit. Sedangkan total luas tanah di empat desa yang diganti yakni 70 hektare. Sebuah penantian yang masih panjang. ● Heri Susetyo/Faishol Taselan/N-3

GANTI RUGI

Penantian yang masih Panjang

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input checked="" type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM
JAN    FEB    MAR    APR    MEI    JUN    JUL    AGST    SEPT    OKT    NOV <b>DES</b> 1 2 3 4 5 6 <b>7</b> 8 9 10 11 12 13 14 15    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : 3		TAHUN 2006

# Miner told to clean up act in Papua

Agence France-Presse  
Washington

A big U.S. public pension fund announced plans Tuesday for a shareholder drive to press mining giant Freeport-McMoRan Copper and Gold Inc. to improve environmental practices at a vast mine in Indonesia.

The move announced by New York City Comptroller William Thompson came in the wake of criticism from the Indonesian government and environmental groups claiming that Freeport-McMoRan has violated environmental standards at its vast gold and copper mine in Indonesia's Papua province.

"Freeport-McMoRan's poor environmental record needs to

be examined," Thompson said in a statement.

"Since Freeport-McMoRan profits from its operations in Indonesia, the least the company can do is ensure that it is not causing environmental damage to the rivers and in any way harming the people of Indonesia," Thompson said.

Thompson oversees New York City's pension funds which are calling on the company's shareholders to urge Freeport-McMoRan at its annual general meeting next year to review its environmental policies in Indonesia.

Freeport-McMoRan spokesman Bill Collier said the company regularly commissions internal and external audits of its environmental practices which it has released publicly.

"We're reviewing their shareholder proposal and we'll respond to it in due course, but I certainly dispute the characterization of our operations. We have very strong and proactive environmental policies and environmental management programs," Collier said.

"We get a lot of scrutiny and a lot of it is self-imposed," Collier said.

The pension funds, which group retirement systems for city workers, teachers and police among other others, control 544,458 Freeport-McMoRan shares worth around US\$29 million.

They want the mining behemoth to report back to shareholders on the environmental concerns by September 2007.

Environmental campaigners have accused Freeport-McMoRan of polluting the World Heritage-listed Lorenz National Park and have also claimed that it has dumped copper-rich ore around the edge of its Papua mining operations.

Collier said such claims were not accurate.

"Freeport-McMoRan may be adversely affecting Indonesia's environment, the Funds' long-term share value, as well as its societal license to operate in Indonesia," Thompson added.

Freeport-McMoRan's annual general meeting usually occurs in May, but it might be delayed in 2007 due to the company's \$25.9-billion bid to acquire U.S. rival Phelps Dodge.

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 36

TAHUN 2006

### Tuntutan Korban Terkabul

Sebuah jumlah hampir dipenuhi PT Energi Mega Perkasa (EMP), pemilik langsung 100% saham Lapindo Brantas, bersedia mengambulkan lunturn harga pembelian harta benda korban semburan Lumpur di Porong Sidoarjo Jawa Timur. EMP bersedia membeli tanah pekarangan warga dengan harga Rp 1 juta per m<sup>2</sup> sedangkan untuk bangunan harganya Rp 1,5 juta per m<sup>2</sup>. Adapun untuk tanah persawahan EMP bersedia membeli dengan harga Rp 20.000 per m<sup>2</sup>.

Dengan kesepakatan ini para korban lumpur sebanyak 2.428 kepala keluarga bisa mulai menyiapkan sura-sura untuk keperluan verifikasi data. Diperkirakan pembayarannya baru mulai April tahun depan kata Rudy Novianto, juru bicara Ilmu Perangalangan Lumpur. Dengan pola cash and carry ini Lapindo jadi perlu lagi menyiapkan pemukiman kepada para korban. Walaupun begitu menurut Rudy kalau ada warga desa yang ingin tinggal secara berkelompok Ilmu akan memfasilitas dengan membangun infrastrukturnya.

87



HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 SUMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2006

**Timnas Lumpur  
Harus Dirombak**

■ JAKARTA- DPR menilai kinerja tim nasional (Timnas) Penanggulangan Lumpur di Porong, Sidoarjo masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, anggota tim tersebut harus dirombak untuk disesuaikan dengan keahlian dan kebutuhan di lapangan.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana mengatakan itu, Selasa (5/12). Menurutnya, apa yang dilakukan PT Lapindo Brantas dalam usaha memberikan ganti rugi sudah cukup maksimal. Namun lambatnya kinerja Timnas mengakibatkan beban PT Lapindo Brantas akan terus bertambah, sehingga bukan tidak mungkin pihak Lapindo akan sulit memenuhi semua harapan masyarakat. (Ino)

89

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input checked="" type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31										
HALAMAN : 17											TAHUN 2006

## Sugiharto: Saham PGNGampang Dijual

JAKARTA (SINDO) – Meneg BUMN Sugiharto mengakui, pemerintah mengutamakan hasil divestasi saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) untuk menutup defisit APBN 2006 dari sektor privatisasi sebesar Rp 1 triliun.

Sugiharto optimistis saham PGN terjual laris manis. "Masih ada waktu tiga pekan lagi, sekarang sedang dalam proses. Untuk menjual *kan gampang*, ini *kan listed company*," kata dia di Jakarta, kemarin.

Tahun ini pemerintah menargetkan pendapatan privatisasi sebesar Rp 3,1 triliun. Divestasi saham yang sudah dilakukan tahun ini antara lain BII dan Bank Lippo.

Sayangnya, Sugiharto belum bersedia menanggapi apakah target privatisasi sebesar Rp3 triliun dapat tercapai atau tidak. Karena, hal tersebut menurut dia sangat spekulatif.

Sementara itu, penawaran saham kedua (*secondary offering*) PGN telah disetujui DPR sebesar 5,31%. Jumlah tersebut setara dengan 185,8 juta lembar saham yang akan dilepas pada bulan ini.

Jika memakai asumsi harga saham PGN pada penutupan perdagangan kemarin di level Rp 11.350, hasil yang dari pelepasan 5,31% saham perusahaan pelat merah itu sebesar Rp2,1 triliun.

(CR10)

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 10

TAHUN 2006

# Perusahaan Korban Lumpur Tuntut Ganti Rugi

Nilai ganti rugi diminta sama dengan warga.

**SIDOARJO** — Sebanyak 20 perusahaan yang menjadi korban semburan lumpur menuntut ganti rugi kepada Lapindo Brantas Inc. Mereka meminta nilai ganti rugi tanah dan bangunan pabrik sama dengan ganti rugi yang diberikan kepada warga. Ganti rugi tanah senilai Rp 1 juta per meter persegi dan bangunan senilai Rp 1,5 juta per meter persegi.

"Prinsipnya, bangunan perusahaan kami sama dengan perumahan warga," kata Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Sugeh Ritong di Sidoarjo kemarin. Selain itu, mereka menuntut ganti rugi seluruh isi pabrik, seperti mesin produksi, bahan produksi, gaji buruh, dan kerugian lain akibat terhentinya produksi.

General Manager PT Catur

Putra Surya ini mengatakan Lapindo bisa saja mengabaikan tuntutan ini jika proposal klaim kerugian yang sudah mereka kirim sebelumnya dibayarkan sampai akhir Desember ini. Total klaim kerugian yang diajukan mencapai Rp 332 miliar. "Sedangkan yang lainnya bisa menyusul," kata Sugeh.

Menanggapi tuntutan ini, Vice President Lapindo Brantas Inc. Yuniwati Teryana mengatakan ganti rugi bagi perusahaan tidak akan sama dengan ganti rugi untuk warga. Sebab, kasusnya berbeda dan skala perusahaan yang menjadi korban juga berbeda. "Jadi ganti ruginya juga harus berbeda," kata Yuniwati se usai pertemuan dengan 20 pengusaha itu.

Kuasa hukum Lapindo Brantas Inc., Fauzi Jurnalis, juga tidak sepakat dengan penyamaan harga tanah dan bangunan tersebut. "Angka itu, tidak akan pernah disamakan," katanya. Ji-

ka Lapindo memenuhi tuntutan tersebut, tentu saja dana yang harus dikeluarkan akan membengkak.

Fauzi mengaku heran para pengusaha itu meminta ganti rugi seperti yang diterima warga. "Kalau warga, saya kira bisa dimaklumi," katanya. Apalagi, menurut dia, sebagian besar pengusaha itu sudah mengirim klaim kerugian tanah dan bangunan sebelumnya. Kenaikan harga tanah yang diklaim belakangan dia nilai tidak wajar. "Apa sedahsyat itu inflasi harga tanah?" ujarnya.

Sebelum membayar ganti rugi tersebut, Lapindo Brantas akan menyampaikan tuntutan para pengusaha ini kepada Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur lebih dulu. Kemudian tuntutan ini akan dilanjutkan kepada Bupati Sidoarjo untuk disampaikan kembali kepada Lapindo guna pengecekan ulang.

● ROHMAN TAUFIK

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**  
1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5

TAHUN 2006

**"Buy Back"  
Saham BUMI  
Bertambah**

■ JAKARTA - Total saham yang telah dibeli kembali (*buy back*) perusahaan pertambangan batu bara PT Bumi Resources Tbk (BUMI) hingga saat ini telah bertambah menjadi 653.234.500 lembar saham, atau 33,67 persen dari jumlah maksimal pembelian yang diizinkan sebanyak 1,94 miliar saham.

Direktur BUMI Eddie J Soebari dalam laporannya kepada Bursa Efek Jakarta (BEJ), Rabu (6/12), mengatakan jumlah tersebut tercapai setelah perserdan pada 4 Desember melakukan pembelian kembali sebanyak 11,5 juta lembar saham, atau 24,31 persen dari total volume pasar 47.305.000 lembar saham pada harga Rp 800 per saham.

PT Bumi Resources Tbk melakukan program pembelian kembali sahamnya mulai 11 Oktober 2006 yang berlangsung hingga 17 November 2007 dengan jumlah maksimum *buy back* saham sebanyak 1.940,40 juta lembar. (ant)

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input checked="" type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM
JAN    FEB    MAR    APR    MEI    JUN    JUL    AGST    SEPT    OKT    NOV <b>DES</b>		
1 2 3 4 5 6 <b>7</b> 8 9 10 11 12 13 14 15    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : 36		TAHUN 2006

# Bencana Alam atau Human Error?

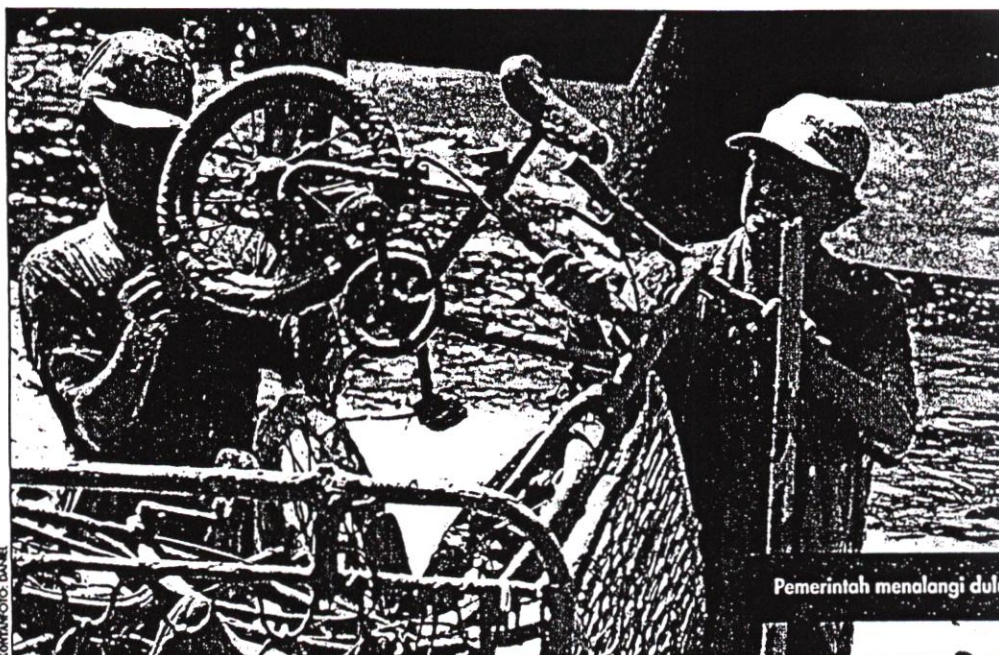
Upaya memastikan apakah semburan lumpur Lapindo bencana alam

Setelah terkata-katung selama setengah tahun lebih, pertanyaan awal seputar semburan lumpur Lapindo menyeruak kembali. Siapakah yang sesungguhnya bersalah dan harus bertanggung jawab? Sayangnya, sejauh ini belum ada petunjuk untuk menjawabnya.

Marga Raharja

Ketika semburan lumpur panas Lapindo mulai muncrat awal Juni silam, khalayak langsung bertanya-tanya: siapa yang bersalah? Sempat muncul polemik soal penyebab semburan lumpur setelah surat Medco Energy yang menyatakan Lapindo tidak memasang casing, bocor ke publik. Namun, semenjak itu, tetap saja jawaban untuk pertanyaan siapa yang salah masih kabur.

Untuk sementara, seluruh pihak yang tersangkut perkara ini seolah sepakat untuk menyanyikan pentingnya penanggulangan dampak semburan, ketimbang mencari jawab atas pertanyaan siapa yang bersalah. Ini jelas lebih penting. Makanya tim-tim teknis bentukan pemerintah maupun Lapindo juga berkonsentrasi mencari cara mengatasi semburan ketimbang menyelidiki penyebabnya. Begitu pula ketika pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006, Tim Nasional yang terbentuk menitikberatkan penanggulangan dampak semburan, baik kepada



Pemerintah menalangi dulu

kalau semburan lumpur Lapindo memang bencana alam. Sayangnya, untuk menetapkan hal itu, belum ada dasar jelas yang bisa dijadikan rujukan.

### Harapan pembuktian pada relief well

Di jalur hukum, saat ini Polda Jawa Timur masih membenahi berita

buran, relief well bisa membuktikan apakah semburan lumpur benar-benar berasal dari sumur Banjar Panji 1 yang dibor Lapindo atau bukan. "Ini begitu penting karena menyangkut siapa yang bertanggung jawab," katanya Rudy.

Celakanya, pemasangan relief well tengah mengalami masalah besar, yaitu soal biaya. Sejumlah kontrak pekerjaan teknis belum dibayar Lapindo, termasuk upah un-

pindo yang bersalah, ya pemerintah tinggal menagih. Kalau tidak begitu, pengeboran dengan relief well yang begitu penting bisa gagal kembali. Padahal, kalau itu terjadi, barang bukti kasus Lapindo ini bisa ikut tenggelam di bawah lumpur.

### Timnas ibarat macan tak bertaring

Benar pemerintah sudah menge-

itu. Dia mengaku pernah diminta untuk bisa membantu menjelaskan kepada masyarakat soal ini. "Intinya, bahwa masalahnya ini bukan *human error*," kata Abdul. Berhubung Lapindo tidak mau memberikan semua data *seismic* yang ia perlukan, Ketua Himpunan Ahli Geologi Indonesia (HAGI) ini dia tak mau membuat pernyataan.

Begitu juga dengan Sony Keraf, anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP. Mantan menteri Lingkungan hidup ini juga curiga ada upaya-upaya serupa. "Bukan hanya itu, saya bahkan melihat penjelasan ESDM dan BPMIGAS seolah seragam dan memberi kesan adanya upaya untuk memanipulasi data," katanya.

Walau terus mengeluarkan ongkos, sejatinya Lapindo sendiri yakin mereka tidak bersalah. Bambang Istadi, Manajer Eksplorasi Lapindo, memang tetap teguh beranggapan tak ada hubungan antara tidak dipasangnya casing dengan semburan lumpur panas yang terjadi. "Kalau orang menganggap casing-nya tak kuat, bocornya mestinya di dalam sumur. Ini kan tidak dari sumur," katanya. Menurut dia semburan lumpur berada pada jarak dua kali lapangan bola dari Sumur Banjar 1.

Jadi, siapa yang salah? Lagi-lagi belum ada jawabannya. □

langsung bertanya-tanya: siapa yang bersalah? Sempat muncul polemik soal penyebab semburan lumpur setelah surat Medco Energy yang menyatakan Lapindo tidak memasang casing, bocor ke publik. Namun, semenjak itu, tetap saja jawaban untuk pertanyaan siapa yang salah masih kabur.

Untuk sementara, seluruh pihak yang tersangkut perkara ini seolah sepakat untuk menyanyikan pentingnya penanggulangan dampak semburan, ketimbang mencari jawab atas pertanyaan siapa yang bersalah. Ini jelas lebih penting. Makanya tim-tim teknis bentukan pemerintah maupun Lapindo juga berkonsentrasi mencari cara mengatasi semburan ketimbang menyelidiki penyebabnya. Begitu pula ketika pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006, Tim Nasional yang terbentuk menitikberatkan penanggulangan dampak semburan, baik kepada manusia maupun lingkungan.

Ada sekelumit penyelidikan soal mencari biang kesalahan. Adalah Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur yang melaksanakannya. Namun, walau sudah berbulan-bulan, hasil penyidikan polisi tak kunjung terang. Pendek kata, hingga saat ini belum ada jawaban atas pertanyaan: siapa penyebab semburan lumpur Lapindo?

Apa boleh buat, kini, pemerintah memang harus segera mencari jawaban atas pertanyaan itu. Seruan sebagian anggota Komisi VII DPR agar pemerintah menalangi dulu dana untuk penanggulangan semburan lumpur sudah mendapat tanggapan jelas dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sejauh ini pemerintah belum menganggarkan dana talangan untuk keperluan itu, baik dalam APBN 2006 maupun APBN 2007. "Selama ini seluruh anggaran untuk menangani berbagai bencana ada di Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Menko Kesejahteraan Rakyat. Kualifikasi penggunaan dana penanggulangan bencana sudah diatur di kedua instansi itu," katanya, pekan lalu.

Mesti tak terucap, kita bisa menyimpulkan bahwa negara bisa saja mengalokasikan dana talangan

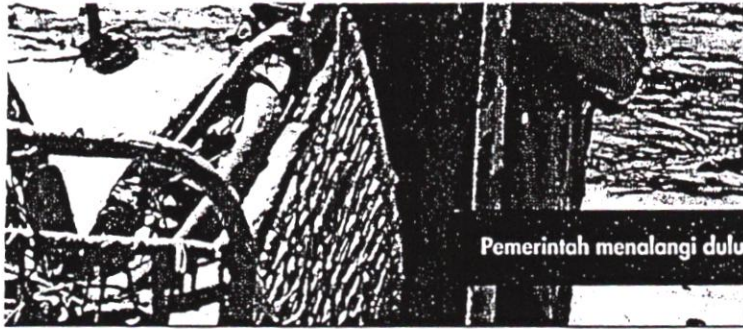
kalau semburan lumpur Lapindo memang bencana alam. Sayangnya, untuk menetapkan hal itu, belum ada dasar jelas yang bisa dijadikan rujukan.

### Harapan pembuktian pada *relief well*

Di jalur hukum, saat ini Polda Jawa Timur masih membenahi berita acara pemeriksaan. Maklum, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menganggapnya belum sempurna. Penyidik masih berusaha mengorek keterangan dari para tersangka, para pekerja maupun petinggi Lapindo, termasuk Imam P. Agustino, *General Manager* Lapindo Brantas.

Taruh kata, kerja polisi beres, masih butuh waktu lama untuk mencari jawaban apakah semburan lumpur akibat bencana alam atau kesalahan manusia. Hakim pengadilan yang berhak untuk menetapkannya. Kalau hakim memutuskan semburan merupakan kesalahan manusia, bisa jadi proses hukum lanjutan masih akan panjang. Intinya, masih berat bagi kita untuk menggunakan hasil proses hukum dalam menyimpulkan apakah semburan lumpur Lapindo bencana alam atau tidak.

Harapan lain ada pada upaya pemasangan *relief well*. Pada awal kasus ini, berbagai upaya penghentian semburan sekaligus bertujuan mencari sebab-musababnya. Belakangan, tak banyak lagi yang ingat hal itu. Padahal, menurut Rudy Rubiandini, konsultan dari ITB yang ikut mendesain pengeboran dengan *relief well*, upaya ini bisa menghasilkan dua hal penting sekaligus. Selain menghentikan sem-



Pemerintah menalangi dulu

buran, *relief well* bisa membuktikan apakah semburan lumpur benar-benar berasal dari sumur Banjar Panji 1 yang dibor Lapindo atau bukan. "Ini begitu penting karena menyangkut siapa yang bertanggung jawab," katanya Rudy.

Celakanya, pemasangan *relief well* tengah mengalami masalah besar, yaitu soal biaya. Sejumlah kontrak pekerjaan teknis belum dibayar Lapindo, termasuk upah un-

pindo yang bersalah, ya pemerintah tinggal menagih. Kalau tidak begitu, pengeboran dengan *relief well* yang begitu penting bisa gagal kembali. Padahal, kalau itu terjadi, barang bukti kasus Lapindo ini bisa ikut tenggelam di bawah lumpur.

### Timnas ibarat macan tak bertaring

Benar pemerintah sudah mengeluarkan keppres untuk membentuk Tim Nasional. Namun, tim ini ibarat macan tanpa taring karena kewenangan mengelola dana penanggulangan tetap ada di tangan Lapindo. Buktinya, untuk kebutuhan di lapangan saat ini, Lapindo hanya menggelontorkan dana sebesar US\$ 1 juta padahal kebutuhan bisa mencapai US\$ 7 juta per minggu. "Ini ada orang yang kemungkinan bersalah, tapi masih diberi tugas melakukan pekerjaan yang sama di tempat yang sama. Bisa saja ada barang bukti yang dihilangkan," cetuk Rudy.

Berbagai tuduhan miring yang mengarah kepada Lapindo memang menyeruak kembali. Tak sedikit pihak yang beranggapan bahwa Lapindo sedang berupaya membentuk opini dan berusaha meyakinkan masyarakat bahwa gejala yang terjadi di Sidoarjo ini gejala alam, tidak terkait dengan kegiatan bisnis mereka. Penerbitan rutin dari Timnas bertajuk LUSI belakangan ini cenderung mengekspos berbagai gejala alam yang mirip, baik di Jawa Timur maupun di daerah-daerah lain.

Abdul Mutalib, ahli geologi fisika lulusan ITB, juga melihat adanya upaya pembentukan opini seperti

ESDM dan BPMIGAS seolah seragam dan memberi kesan adanya upaya untuk memanipulasi data," katanya.

Walau terus mengeluarkan ongkos, sejatinya Lapindo sendiri yakin mereka tidak bersalah. Bambang Istadi, Manajer Eksplorasi Lapindo, memang tetap teguh beranggapan tak ada hubungan antara tidak dipasangnya *casing* dengan semburan lumpur panas yang terjadi. "Kalau orang menganggap *casing*-nya tak kuat, bocornya mestinya di dalam sumur. Ini kan tidak dari sumur," katanya. Menurut dia semburan lumpur berada pada jarak dua kali lapangan bola dari Sumur Banjar 1.

Jadi, siapa yang salah? Lagi-lagi belum ada jawabannya. □

**...Pemerintah yang memegang urusan duit dulu. Kalau nanti terbukti Lapindo yang bersalah, ya pemerintah tinggal menagih...**

tuk tenaga kerja. Begitu juga dengan pengadaan landasan karet serta pasir untuk membangun gundukan. Para pemasoknya ogah menyerahkan barang karena belum ada kepastian dana pembayaran. "Sesungguhnya masalahnya bukan hanya di dalam perut bumi, tapi juga di permukaannya," kata Rudy.

Itu sebabnya Rudy usul agar pemerintah yang memegang urusan duit dulu. Kalau nanti terbukti La-

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input checked="" type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV <b>DES</b> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 9		
TAHUN 2006		

# Dandan enggak, ya?

Mengantisipasi *window dressing* di bursa saham

Akhir tahun ini para manajer investasi mungkin tak akan mendandani portofolio investasinya (*window dressing*). Tapi, masih ada kemungkinan bahwa aksi berdandan di pengujung tahun akan dilakukan oleh emitenya sendiri.

Djumyati Partowidjaja,  
Yuwono Triatmodjo

**M**enjelang akhir tahun, dengan berbagai cara, para manajer investasi biasanya akan berusaha mengerek harga saham-saham yang ada di dalam keranjang investasinya. Tujuan mereka, tentu saja, adalah agar kinerja portofolio investasi mereka terlihat cantik, dan investor yang menjadi kliennya pun puas. Karena itulah, langkah berdandan ini biasa disebut sebagai aksi *window dressing*.

Sayang, untuk tahun ini para analis di pasar modal tak terlalu yakin bahwa para pemutar uang itu masih mau mendandani harga saham yang ada di dalam portofolionya. Para analis yang dihubungi KONTAN memberikan komentar senada: "Buat apa lagi? Dengan IHSG yang sudah naik tinggi seperti sekarang, kinerja mereka kan sudah bagus," kata Harry Kurniawan, analis PT Bapindo Bumi Sekuritas. Harry bilang, jika melakukan *window dressing*, artinya para manajer investasi itu harus mengeluarkan biaya tambahan yang tak perlu.

Tapi, jangan lupa; selain dilakukan oleh manajer investasi, tak jarang aksi *window dressing* itu juga dilakukan emitenya sendiri. Meskipun sering tak mau terang-terangan, pada dasarnya manajemen perusahaan-perusahaan yang mejeng di bursa ingin menjaga harga sahamnya. Apalagi kalau ada kondisi tertentu yang membuat harga saham perusahaan mereka melorot di tengah kondisi pasar yang sedang bergairah (*bullish*).

## Perhatikan PGAS, MEDC, dan BLTA

Saat ini para analis curiga bahwa beberapa emiten akan menaburkan pupuk tebal di akhir tahun. Sebut saja PT Medco Energi International Tbk (MEDC) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS). Saham kedua perusahaan ini sempat ikut melempem gara-gara efek lumpur Lapindo. Selain itu, ada juga saham PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) yang harganya justru merosot sejak akhir Oktober lalu.

Menurut rumor yang beredar di pasar, manajemen Medco akan mengangkat harga sahamnya demi mengangkat citra Medco yang telah tercoreng. Kebetulan, para analis juga menilai valuasi saham MEDC yang saat ini (4/12) dihargai Rp 3.100 per saham masih murah. Menurut Sebastian Tobing, analis Trimegah Sekuritas, seharusnya

harga MEDC bisa sampai Rp 3.950 per saham. Harry memperkirakan harga saham Medco bakal bergerak ke kisaran Rp 3.700-Rp 3.800 per saham.

PGAS lain lagi ceritanya. Kabar di pasar mengatakan bahwa manajemen PGAS akan mendandani

harga sahamnya demi kepentingan pemerintah yang akan melepas 5,3% saham PGAS. Jika harga saham PGAS berhasil dikerek, pemerintah bisa menjual sahamnya di harga tinggi. Jadi, jangan heran kalau beberapa analis memperkirakan harga saham distributor gas ini

bisa melejit ke Rp 16.900 per saham; dari harga sekarang (4/12) yang Rp 10.600.

Terakhir, Berlian Laju Tanker yang ingin menjual obligasi untuk mendanai ekspansi pembelian kapal-kapal tanker barunya juga dikabarkan akan mendandani sahamnya. Mereka butuh kenaikan harga sahamnya lagi supaya citra perusahaan bisa kembali naik di mata para investor. Beberapa analis memperkirakan harga bersimbol BLTA bisa naik lagi ke Rp 2.000 per saham, dari kisaran Rp 1.780 per saham saat ini (4/12).

Tapi, amat sulit untuk bisa memastikan apakah aksi *window dressing* benar-benar akan terjadi. Pasalnya, ketika dikonfirmasi, manajemen emiten-emiten itu menyangkal bahwa mereka tengah mendandani saham perusahaannya. "Kita enggak melakukan cara-cara seperti itu," tutur Hilmi Panigoro, CEO PT Medco Energi International. Widiharja Tanujaya, Presiden Direktur PT Berlian Laju Tanker, memberikan jawaban senada. "Kita sesuai dengan aturan mainlah. (Naik-turun harga) itu kan berlaku hukum pasar saja," ujarnya.

Kalau sudah begini, sebaiknya para investor benar-benar pasang mata dan kuping. Begitu harga saham-saham itu benar-benar menunjukkan gejala akan melejit, investor bisa ikut nimbrung. Jangan sampai ketinggalan kereta. □